

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
Periode 2018-2020)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Erina Setiana Putri
NIM : E20183035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2022**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
Periode 2018-2020)**

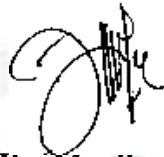
SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Erina Setiana Putri
NIM : E20183035

Disetujui Pembimbing



Nur Ika Mauliyah, M. AK
NIP.198803012018012001

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
Periode 2018-2020)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah


Hari: Jum'at
Tanggal: 14 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Toton Fanshurna, M.EI
NIP. 198112242011011008


Moh. Mirza Pratama, S.ST., M.M
NIP. 201907165

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, M.Si
2. Nur Ika Mauliyah, M.Ak

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 1976803072 200003 1 001

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, merupakan untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya” Q.S Al-Hasyr [59] ayat 7.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al Fatih), 546.

PERSEMBAHAN

Segala puji kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Wairin dan Ibu Tamisah tercinta yang menjadi inspirasi utama dan tidak henti-hentinya membimbing, mendidik, menasehati, memotivasi dan selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak-anak yang mampu memberikan manfaat bagi orang-orang disekitarnya dan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat.
2. Keluarga besar saya yang terus menyemangati saya sehingga saya bisa mengejar impian saya.
3. Teman-teman AKS 1 yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.
4. Teman-teman angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari semester pertama hingga akhir perkuliahan.
5. Almamater tercinta khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi generasi penerus.
6. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Nur Ika Mauliyah M. AK selaku PLT Koordinator Prodi Akuntansi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan memberikan arahan, bimbingan, waktu serta saran terbaik untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik yang telah mempublikasikan laporan keuangan dalam situs internet sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan.
10. Bapak Toton Fanshurna, M.EI selaku ketua sidang, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Si selaku penguji utama, Ibu Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku penguji pendamping dan Bapak Moh. Mirza Pratama, S.ST., M.M yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian saya.

Jember, Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Erina Setiana Putri, Nur Ika Mauliyah. M. AK. 2022: *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020).*

Belanja modal merupakan salah satu dari pengeluaran daerah yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang berkelanjutan. Adanya penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui fasilitas umum yang akan mampu meningkatkan belanja modal sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat.

Rumusan masalah penelitian yang diteliti dalam skripsi ini merupakan: (1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal?. (2) Apakah PAD berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?. (3) Apakah DAU berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal?. (4) Apakah DAK berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal?. (5) Apakah Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?. Tujuan dari Penelitian ini merupakan: (1) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap anggaran Belanja Modal. (2) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh PAD terhadap anggaran Belanja Modal. (3) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh DAU terhadap anggaran Belanja Modal. (4) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh DAK terhadap anggaran Belanja Modal. (5) Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan terhadap anggaran Belanja Modal

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai metode *sampling jenuh*, jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 114 (38 x 3). Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi pustaka dan studi dokumenter. Analisis data yang dipakai yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis regresi linier sederhana dan berganda dengan bantuan program SPSS Statistik Versi 23.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. 2) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. 3) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. 4) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. 5) Variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Ruang Lingkup	20
1. Variabel Penelitian	20
2. Indikator Penelitian	21
F. Definisi Operasional	23
G. Asumsi Penelitian	24
H. Hipotesis	24

I. Metode Penelitian	26
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
2. Populasi dan Sampel	26
a) Populasi	26
b) Sampel	27
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	28
a) Studi Pustaka	28
b) Studi Dokumenter	28
c) Sumber Data	29
4. Analisis Data	29
a) Statistik Deskriptif	30
b) Uji Asumsi Klasik	30
c) Uji Hipotesis	33
J. Sistematika Pembahasan	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA	37
A. Penelitian Terdahulu	37
B. Kajian Teori	52
1. Pertumbuhan Ekonomi	52
2. Pendapatan Asli Daerah	57
3. Dana Alokasi Umum	62
4. Dana Alokasi Khusus	64
5. Belanja Modal	67

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	72
A. Gambaran Obyek Penelitian	72
1. Letak Geografis	72
2. Administratif	72
3. Kependudukan	73
4. Keuangan	73
B. Penyajian Data	74
C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	78
1. Analisis Statistik Deskriptif	78
2. Uji Asumsi Klasik	80
3. Uji Hipotesis	86
D. Pembahasan	94
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	

7. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
8. Peta Provinsi Jawa Timur
9. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
10. Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
11. Data Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
12. Data Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
13. Data Belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020
14. Transformasi Data Dalam Bentuk SQRT (Akar Kuadrat)
15. Data Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2020
16. Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS Versi 23
17. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
1.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Jawa	8
1.2 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ..	9
1.3 Indikator Variabel	22
1.4 Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	27
2.1 Penelitian Terdahulu	48
3.1 Transformasi Data dalam Bentuk SQRT (Akar Kuadrat)	75
3.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	78
3.3 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	81
3.4 Hasil Uji Multikolinearitas	83
3.5 Hasil Uji Autokorelasi	85
3.6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pertumbuhan Ekonomi	86
3.7 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pendapatan Asli Daerah.....	87
3.8 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum	89
3.9 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Khusus.....	90
3.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	91

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
1.1 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Se-Indonesia TA 2021..	9
1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dan Nasional 2018-2021 (<i>y-on-y</i>)	11
1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dan Nasional 2018-2021 (<i>q-to-q</i>)	12
1.4 Komposisi Realisasi PAD dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam Persen)	13
1.5 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam miliar rupiah)	14
1.6 Komposisi Alokasi Belanja Daerah dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam Persen)	16
1.7 Kerangka Pemikiran	24
3.1 Grafik P-P Plot Normalitas	81
3.2 Grafik Scatterplot	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi di Pulau Jawa yang telah menjalankan otonomi daerah salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Karena prinsip dasar otonomi yaitu otonomi yang merata, realistis dan bertanggung jawab, maka diharapkan mempertimbangkan aspek demokrasi, partisipasi, dan keadilan dengan tetap memperhatikan keragaman dan potensi daerahnya. Adanya kebijakan otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari otonomi dan kebijakan pembangunan nasional seperti yang dituntut pada masa reformasi bergulir. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memprioritaskan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan rakyat hingga ke wilayah pelosok, baik dari segi nilai atau keunggulan.³

Kunci kesuksesan pelaksanaan otonomi adalah pendapatan fiskal daerah yang cukup untuk menyediakan pendanaan dalam mewujudkan otonomi daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat (6).

³ Wa Ariadi, *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 1.

Kuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan misi pemerintahan, kebijakan layanan publik, serta pembangunan.⁴

Anggaran daerah yaitu rencana keuangan yang dijadikan sebagai landasan dalam pemberian layanan dan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah daerah. Di Indonesia, laporan rancangan anggaran daerah dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu provinsi, kabupaten atau kota. APBD mencerminkan kebutuhan rakyat dengan mempertimbangkan sumber kekayaan dan potensi yang ada di daerah.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶ Susunan APBD diantaranya yaitu 1) pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan daerah.

Proses pembentukan APBD diawali dari kedua belah pihak, (1) Pemerintah daerah menyatakan keseluruhan kebijakan umum APBD kepada DPRD sesuai dengan rancangan kerja pemerintah daerah. (2) DPRD dan pemerintah daerah membahas kebijakan umum APBD. (3) Setelah keseluruhan kebijakan umum APBD disetujui, pemerintah daerah dan DPRD secara bersama-sama akan mengkaji Prioritas dan Plafon Anggaran

⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), 9.

⁵ Faradilla Herlin, dkk, *Kuangan Daerah*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 15.

⁶ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Pasal 1 ayat (1).

Sementara (PPAS). (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan mengacu pada PPAS yang disepakati DPRD dan pemerintah daerah. (5) DPRD membahas RKA-SKPD yang sudah disampaikan dalam rapat pendahuluan RAPBD. (6) Hasil dari pembahasan RKA-SKPD yaitu rancangan anggaran, yang akan disampaikan kepada pengelola keuangan daerah. (7) Berdasarkan RKA-SKPD seluruh SKPD, pejabat keuangan daerah membuat RAPBD. (8) RAPBD disampaikan untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, disertai uraian tentang RAPBD dan dokumen pelengkap lainnya. (9) Jika RAPBD disetujui bersama, maka akan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dan DPRD.⁷

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian dengan mengelola sumber daya dan potensi, menjalin hubungan dengan penduduk setempat, dan membentuk lapangan kerja baru yang berdampak pada kemajuan kegiatan perekonomian lokal. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan belanja modal meskipun terkadang tidak terlalu signifikan.⁸ Selain itu pertumbuhan ekonomi menentukan seberapa besar tambahan yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian bagi penduduk selama periode waktu

⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 13.

⁸ Siti Mundiroh, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* vol. 2, No. 1 (Januari, 2019), 105, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2528/pdf>.

tertentu. Karena pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menciptakan aliran imbalan bagi faktor-faktor produksi milik penduduk. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan penduduk yang memiliki faktor produksi diharapkan akan meningkat.⁹

Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan yang besar untuk menggali potensinya sebagai pendapatan guna menangani kebutuhan daerah salah satunya menyediakan layanan masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 13, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁰ Salah satu jenis pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang.¹¹

Adanya desentralisasi fiskal, diharapkan akan meningkatkan pelayanan di beberapa bidang, khususnya di sektor publik. Meningkatnya pelayanan publik, seharusnya mampu membuat daerah lebih menarik bagi para investor untuk mendirikan perusahaan di kawasan tersebut. Tentunya harapan ini

⁹ Patta Rappana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 7.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (13).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (20).

dapat terpenuhi apabila pemerintah berupaya memberikan kemudahan dalam investasi. Namun, setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk membiayai programnya, sehingga menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengurangi ketimpangan keuangan baik secara horizontal maupun vertikal, pemerintah pusat mentransfer dana dari APBN sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Dito Ganinduto, RUU HKPD berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah dan juga akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemandirian daerah dan pemerataan pelayanan publik yang memadai.¹² Transfer dana yang diperoleh diharapkan dapat memungkinkan pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan PAD dalam mendanai anggaran belanja modal di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak akan terus menerus mengandalkan dana transfer yang diberikan karena belum optimalnya PAD.¹³

Dana alokasi umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.¹⁴ Dari penjelasan tersebut disimpulkan DAU sebagai alat untuk menangani ketidakseimbangan antar daerah, tetapi juga menjadi

¹² Agus Raharjo. "Ketua Komisi XI: RUU HKPD Perkuat Desentralisasi Fiskal, RUU HKPD Diharapkan Meningkatkan Pemerataan Masyarakat Se-Indonesia". *Republika Online*, Diakses 01 September 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r2bt436/ketua-komisi-xi-ruu-hkpd-perkuat-desentralisasi-fiskal>.

¹³ Putri Retno Aryani dan Kurnia Krisna Hari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* Vol. 24 No.2 (Juli, 2019), 194. <https://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak/article/download/3/95>.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (71).

sumber pendanaan bagi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah juga diberikan kekuasaan oleh pemerintah pusat dengan pendelegasian dana, fasilitas, serta SDM. Dana tersebut akan disetorkan dalam wujud dana transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.¹⁵

Belanja modal sebagai bagian dari pengeluaran daerah yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang berkelanjutan. Menurut Halim, Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode anggaran serta dapat menaikkan aset / kekayaan daerah sehingga akan mengakibatkan pengeluaran rutin bertambah seperti biaya pemeliharaan untuk mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset.¹⁶ Belanja modal yang rendah membuat kinerja berbagai instansi pemerintah juga menurun. Di sisi lain, belanja modal juga memainkan peran penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penanda kesuksesan pencapaian pembangunan ekonomi sehingga diperlukannya investasi pemerintah dalam mengucurkan anggaran.¹⁷

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (72).

¹⁶ Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017),129.

¹⁷ Anika Syahdila, Muctolifah, dan Sishadiyat, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal”, *Jembura*

Pergeseran komposisi belanja menjadi langkah logis yang bisa dipakai pemerintah daerah untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Pergeseran tersebut bermaksud untuk peningkatan investasi dengan wujud aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, gedung serta aset tetap lain. Karena persyaratan utama pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik adalah aset tetap yang didapat melalui belanja modal. Semakin besar jumlah investasi yang diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, semakin besar pula ketersediaan yang diharapkan. Pembangunan sarana dan prasarana yang baik mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai macam bidang serta dapat meningkatkan produktivitas penduduk. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui prosedur kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang.¹⁸

Dengan luas wilayah 126.700 kilometer persegi, Jawa merupakan salah satu pulau terbesar kelima di Indonesia. Pulau Jawa juga memperoleh julukan sebagai pulau paling padat di Indonesia maupun di dunia yaitu sekitar 160 juta jiwa, setengah dari jumlah penduduk Indonesia terletak di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk 1.317 jiwa per kilometer. Tidak mengherankan, Jawa menjadi pusat industri dan perekonomian paling maju di Indonesia. Selain itu pusat pemerintahan berada di Pulau Jawa, tepatnya terletak di ibu kota Jakarta sebelum nantinya dipindahkan ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yaitu Jawa

Economic Education Journal, Volume 3 No. 2, E-ISSN: 2656-4378, P-ISSN: 2655-5689 (Juli 2021), 85, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jej/article/view/10985>.

¹⁸ Ilham Ahmad Maulana, Endang Masitoh, Riana R Dewi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", *Tirtayasa Ekonomika* Vol. 15 No. 1, (April, 2020), 87, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/7102/5375>.

Barat dengan luas wilayah sekitar 35.377, 76 km², Jawa Timur dengan luas wilayah 47. 803, 49 km², Jawa Tengah dengan luas wilayah 32.800,69 km², Banten dengan luas wilayah 9.662, 92 km², DKI Jakarta dengan luas wilayah 664,01 km², dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 3.133,15 km².¹⁹

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Provinsi di Pulau Jawa

No.	Nama Provinsi	Luas Wilayah (km ²)
1.	Jawa Barat	35.377, 76 km ²
2.	Jawa Timur	47. 803, 49 km ²
3.	Jawa Tengah	32.800,69 km ²
4.	Banten	9.662, 92 km ²
5.	DKI Jakarta	664,01 km ²
6.	DI Yogyakarta	3.133,15 km ²

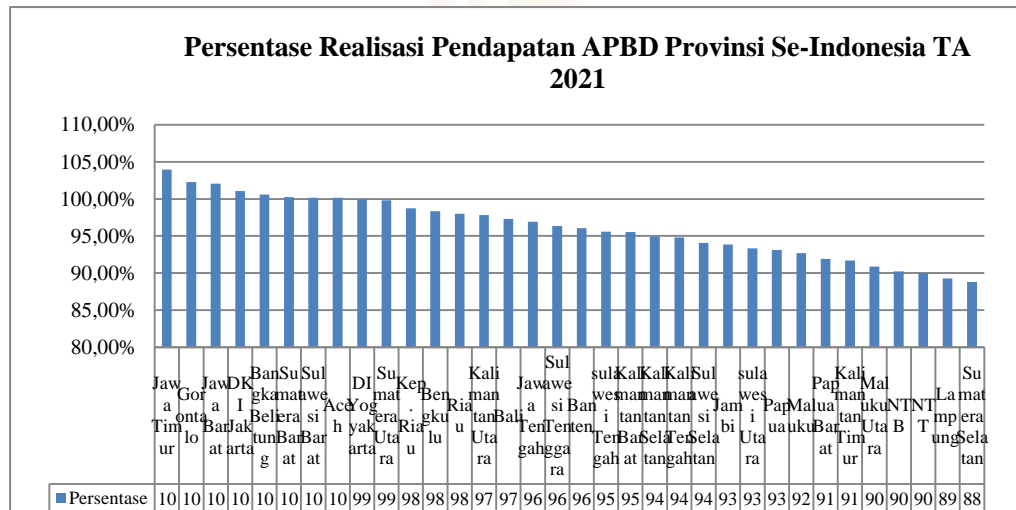
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 40,67 juta jiwa menurut sensus penduduk pada tahun 2020 dengan luas wilayah 47. 803, 49 km². Maka tidak heran jika Jawa Timur memiliki banyak wilayah perkotaan atau urban. Jawa Timur memiliki beberapa sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, industri manufaktur, perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun masih dalam suasana pandemi covid-19, realisasi penerimaan APBD Jawa Timur tahun 2021 menduduki peringkat kesatu nasional yaitu mencapai 103,97% dari sasaran pemasukan sebesar Rp. 32,9 triliun, hingga tanggal 31 Desember 2021 telah direalisasikan Rp. 34,2 triliun. Untuk peringkat kedua diduduki Provinsi Gorontalo dengan persentase sebesar 102,28%, sedangkan

¹⁹ Badan Pusat Statistik, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2021", Diakses 03 April 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data-pub.

untuk peringkat ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 102,07%.²⁰

Gambar 1.1 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Se-Indonesia TA 2021



Sumber: data diolah peneliti

Dengan rincian realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

Tabel 1.2 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
PAD	Rp. 17,1 triliun	Rp. 18,9 triliun	110,50%
A. Pajak Daerah	Rp. 14,2 triliun	Rp. 15,4 triliun	108,25%
B. Retribusi Daerah	Rp. 110,3 miliar	Rp. 110,6 miliar	100,33%
C. Hasil Kekayaan Daerah	Rp. 404,5 miliar	Rp. 408,6 miliar	101,03%
D. Lain-lain PAD	Rp. 2,3 triliun	Rp. 3 triliun	126,45%
Pendapatan Transfer	Rp. 15,6 triliun	Rp. 15,1 triliun	97,12%
Lain-lain Pendapatan Daerah	Rp. 200,2 miliar	Rp. 151 miliar	75,45%
Belanja Daerah	Rp. 36,6 triliun	Rp. 33,7 triliun	92,14 %

Sumber: data diolah peneliti

²⁰ Ichsan Emerald Alamsyah, "Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2021 Tertinggi Nasional", Republika Online, Diakses 07 Januari 2022, <https://m.republika.co.id/amp/r5alq3349>.

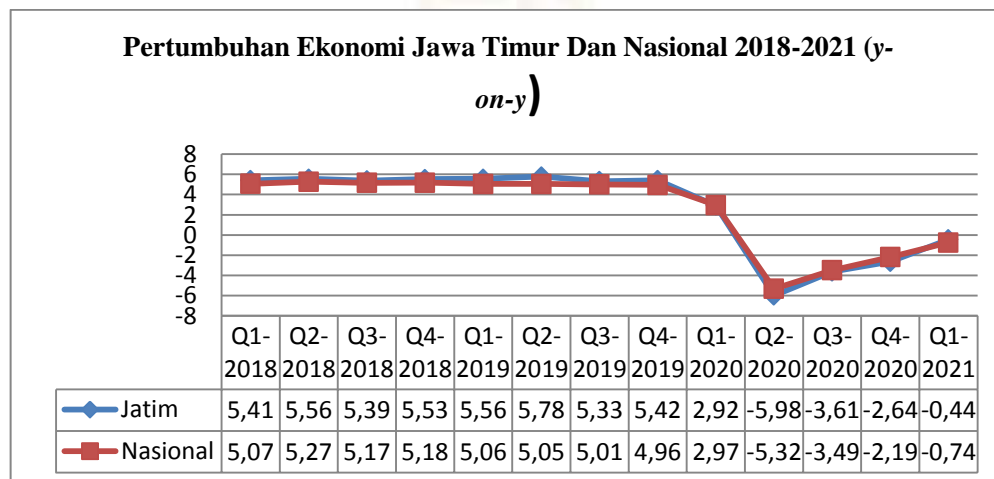
Pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai Rp. 587,33 triliun diukur dengan memakai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga, sedangkan PDRB atas harga konstan mencapai Rp. 406,43 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,44 % pada triwulan I-2021 dibandingkan dengan triwulan I-2020 (y-on-y). Karena RKPD 2021 telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,07-5,77%, maka untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya dan komitmen yang lebih dari pemerintah daerah dan tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. Sementara itu, dari segi produksi, usaha transportasi dan pergudangan mengalami perkembangan negatif atau kontraksi terdalam sebesar 13,30%.²¹

Di sisi lain, sektor usaha yang tumbuh paling cepat yaitu sektor usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,47%. Manufaktur penyumbang terbesar di Jawa Timur masih mencatat pertumbuhan negatif sebesar 0,63%, sedangkan sektor usaha terbesar kedua yaitu grosir/eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,30%. Begitu pula dengan sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan penyumbang terbesar ketiga yang terus mencatat pertumbuh positif sebesar 4,74% mengikuti trend pertumbuhan positif tahun 2020 sebesar 0,94% (c-to-c).²²

²¹ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2021*, Surabaya: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pendaharaan, 2021, 1, <http://djpk.kemenkue.go.id>.

²² Ibid., 2.

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dan Nasional 2018-2021 (y-on-y)

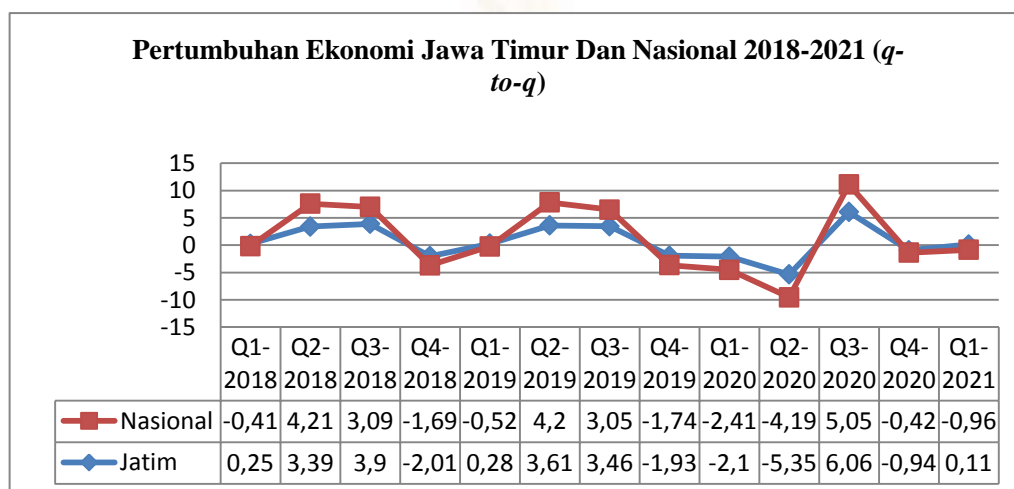


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Di sisi permintaan, sebagian besar pendorong PDRB mengalami penurunan, faktor akselerasinya yaitu pengeluaran komunikasi permintaan sebesar 0,53%. Faktor yang paling banyak mengalami penurunan adalah ekspor luar negeri sebesar 9,94%, diikuti oleh sebesar PMTB 2,68%, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,92%, dan LNPRRT sebesar 0,14%. Perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 0,11% (*q-toq*) pada Q1 2021 dibandingkan dengan Q4 2020. Dari sisi produksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang porsi terbesar sebesar 12,23%, diikuti oleh perdagangan grosir / eceran, reparasi mobil / motor sebesar 2,04%, penyediaan air bersih / pengelolaan limbah / daur ulang sebesar 0,93%. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga turun sebesar 2,18%, LNPRRT

sebesar 0,12%, konsumsi pemerintah sebesar 31,45%, PMTB sebesar 2,29% dan ekspor luar negeri sebesar 0,63%.²³

Gambar 1.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dan Nasional 2018-2021 (q-to-q)



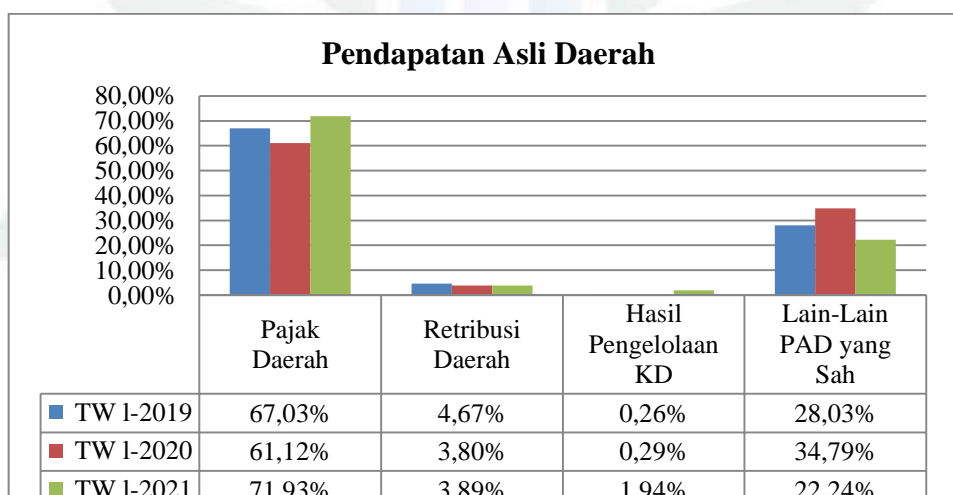
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Realisasi PAD pada triwulan I-2021 mencapai Rp. 6,45 triliun atau 17,47% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021. Capaian tersebut secara nominal turun sebesar Rp. 1,73 triliun atau 3,31% dibandingkan dengan capaian realisasi triwulan I-2020 dan Rp. 962,25 miliar atau 3,88% dibandingkan dengan triwulan I-2019. Komposisi realisasi PAD yang mengalami penurunan yaitu lain-lain PAD yang sah turun 49,63 %, kemudian retribusi daerah turun sebesar 19,43 %, dan pajak daerah turun sebesar 7,30 %. Komposisi realisasi PAD yang meningkat lebih tinggi merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai sebesar 425,08 %.

²³ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2021*, 2.

Komposisi realisasi PAD mengalami perubahan yang signifikan tahun 2019-2020 dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada triwulan I-2021 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 71,93% atau 4,9% dibandingkan dengan triwulan I-2019. Kontribusi retribusi daerah pada triwulan I-2019 turun dari 4,67% menjadi 3,89% pada triwulan I-2021. pada Kontribusi lain-lain PAD yang sah menurun tajam menjadi 22,24% pada triwulan I-2021 dibandingkan dengan triwulan I-2019 yang memiliki kontribusi sebesar 28,03%.²⁴

Gambar 1.4 Komposisi Realisasi PAD dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam Persen)



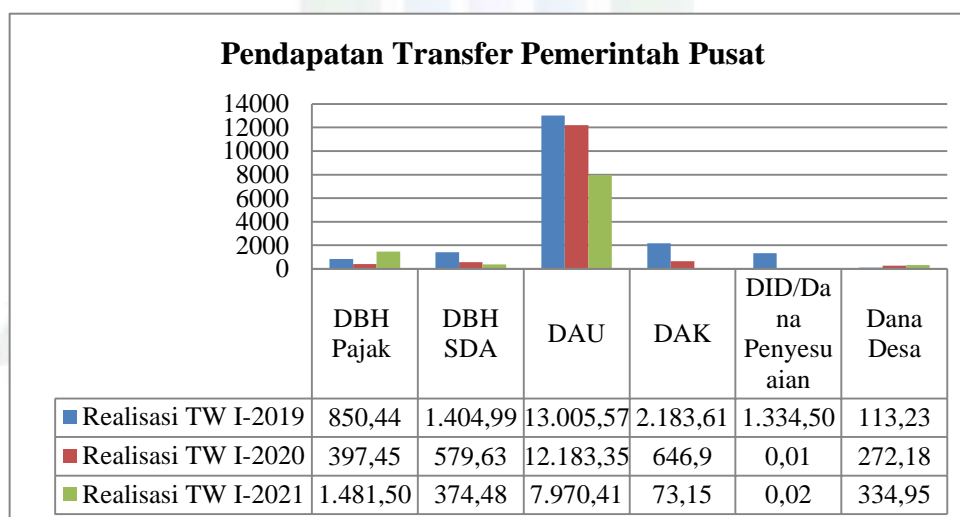
Sumber : GFS Triwulan I 2019-2021 (diolah)

Pada triwulan 1-2021 realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase dibandingkan dengan triwulan I-2019 dan 2020. Penurunan nominal terbesar pada triwulan I-2021 berasal dari realisasi DAU yang mencapai Rp. 9,16 triliun dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I-2020, diikuti DID/Dana Bos

²⁴ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2021*, 18.

sebesar Rp. 5,01 triliun, dan DAK sebesar Rp. 2,41 triliun rupiah. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang mengalami peningkatan mencapai Rp. 2,78 triliun pada triwulan I-2021 jika dibandingkan dengan realisasi pajak DBH pada triwulan I-2020. Kenaikan tersebut karena pemerintah pusat pada triwulan I-2021 menerapkan kebijakan untuk mempercepat DBH penyaluran kurang bayar pajak.²⁵

Gambar 1.5 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam miliar rupiah)



Sumber : GFS Triwulan I 2019-2021 (diolah)

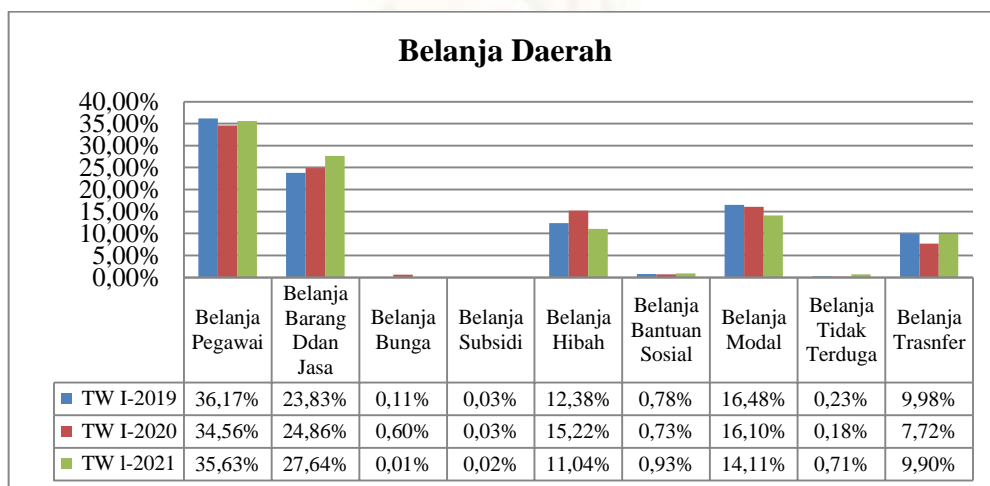
Sementara itu, realisasi belanja daerah dalam APBD konsolidasi triwulan I-2021 sebesar Rp. 10,68 triliun. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan baik secara nominal maupun persentase dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I-2019 dan 2020. Realisasi belanja daerah tumbuh negatif sebesar -14,78% dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I-2020. Sebagian besar kategori belanja daerah

²⁵ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2021*, 19.

menunjukkan pertumbuhan negatif, hanya belanja tak terduga dan belanja transfer yang menunjukkan pertumbuhan positif. Di sisi lain, realisasi belanja transfer mencatat pertumbuhan positif karena realisasi transfer dana desa dari pemerintah pusat pada triwulan I-2021 yang mencapai lebih dari 24,39% yang tercatat sebagai belanja transfer ke desa oleh pemerintah daerah. Proporsi pagu yang dialokasikan per kategori belanja daerah tidak berubah secara signifikan antara periode triwulan I-2019 dan 2020. Akibatnya, proporsi belanja daerah dalam belanja pegawai di atas 34 %, diikuti oleh belanja barang di atas 23% dan belanja modal di atas 14,11%. Persentase belanja daerah pada alokasi pagu mengalami kenaikan pada triwulan I-2021 dibandingkan dengan alokasi pagu triwulan I-2020 yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan persentase belanja daerah yang mengalami penurunan pada alokasi triwulan I-2021 adalah belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah jika dibandingkan dengan alokasi pagu triwulan I-2020. Hal ini dikarenakan adanya pengeluaran daerah untuk menangani pandemi Covid-19.²⁶

²⁶ Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2021*, 21.

Gambar 1.6 Komposisi Alokasi Belanja Daerah dalam APBD Konsolidasi di Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2019-2020 (dalam Persen)



Sumber : GFS Triwulan I 2019-2021 (diolah)

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan membuktikan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.²⁷ Penelitian ini sependapat dengan penelitian Hanjelin Novianti dan Sri Rahayu yang membuktikan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.²⁸

²⁷ Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam", (Skripsi., Universitas Sumatera, 2018), 64.

²⁸ Hanjelin Novianti dan Sri Rahayu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pegalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020)", *E-Proceeding of Management* Vol. 8 No. 5 ISSN: 2355-9357, (Oktober 2021), 524, <https://openlibrarypublications.telkom.ac.id/index.php/manajemen/article/view/16494>.

Di sisi lain, hasil penelitian Beby Agustian Zebua membuktikan bahwa secara parsial hanya variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.²⁹ Hal ini berbeda dengan penelitian Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Lupikah yang membuktikan bahwa hanya variabel dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.³⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan itu, judul penelitian ini merupakan: **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)”**.

²⁹ Beby Agustian Zebua, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota di Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020), 65.

³⁰ Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Luptikah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Karanganyar Tahun 2017-2019.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No. 2, ISSN: 2337-568x (Desember 2020): 1-12. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/781>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur ?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini merupakan:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.

2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini merupakan:

1. Bagi para akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), khususnya pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

Dapat juga sebagai referensi untuk penelitian lain.

2. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat bagi penulis berupa tambahan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pendapatan asli daerah sehingga dapat mengembangkan daerah, tetap mewujudkan konsep desentralisasi, dan menjadi daerah otonom yang dapat membentuk pemerintahan daerah mandiri yang tidak bergantung pada pemerintah pusat.

E. Ruang Lingkup

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian, atau bentuk yang dipilih peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi tentangnya sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan³¹

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, bagian:

³¹ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, (Lumajang: Widya Gama Press, 2021), 36.

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sehingga variabel terikat memiliki pengaruh secara negatif maupun positif terhadap variabel independen.³²

Variabel bebas yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi (X_1)
2. Pendapatan asli daerah (X_2)
3. Dana alokasi umum (X_3)
4. Dana alokasi khusus (X_4)

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau hasil dari variabel independen (bebas). Variabel inilah yang menarik perhatian peneliti / menjadi perhatian utama penelitian, sifat dan tujuan masalah dalam penelitian ini tercermin dalam variabel dependen yang dipakai. Variabel terikat yang dipakai pada penelitian ini yaitu Belanja Modal.

2. Indikator Variabel

Indikator variabel pada penelitian ini merupakan :

³² Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, 37.

Tabel 1.3
Indikator Variabel

Judul	Variabel	Indikator
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020.)	Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. ³³
	Pendapatan Asli Daerah (X_2)	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah. ³⁴
	Dana Alokasi Umum (X_3)	a. Celah Fiskal b. Alokasi Dasar. ³⁵
	Dana Alokasi Khusus (X_4)	a. Kriteria Umum b. Kriteria Khusus c. Kriteria Teknis. ³⁶
	Belanja Modal (Y)	a. Belanja Tanah b. Belanja Peralatan dan Mesin c. Belanja Gedung dan Bangunan d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Belanja Modal Lainnya f. Belanja Modal Badan Layanan Umum. ³⁷

Sumber: data diolah peneliti.

³³Patta Rappana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 9.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (20).

³⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 25.

³⁶ Dody Dharma Hutabarat., dkk, *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Pendaharaan dan anggaran Negara*”, (Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2021), 21-22.

³⁷ Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran*, hal 30-31.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang dipakai sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumus yang didasarkan pada indikator variabel³⁸

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara berubah menjadi lebih baik selama periode waktu tertentu.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, layanan kepada masyarakatnya, dan penggunaan sumber daya yang ada.

3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan

³⁸ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 61-62.

membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

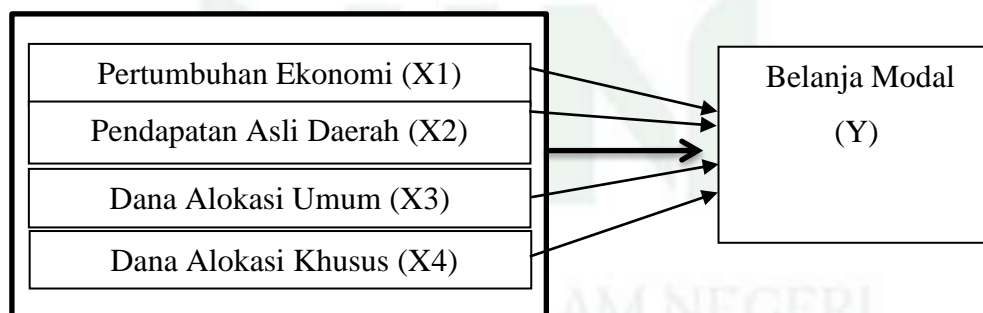
5. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode anggaran dan meningkatkan aset / kekayaan daerah sehingga dapat mengakibatkan pengeluaran rutin bertambah seperti biaya pemeliharaan untuk mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian, juga disebut anggapan dasar atau postulat, yaitu titik awal untuk penalaran yang kebenarannya diterima oleh peneliti.³⁹ Asumsi penelitian dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.7
Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah oleh peneliti

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan tentatif tentang tindakan, fenomena/situasi tertentu yang diperkirakan akan terjadi atau sudah terjadi.

Menurut Kuncoro, hipotesis adalah pernyataan peneliti mengenai hubungan

³⁹ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 62.

antara variabel penelitian dan pernyataan yang sangat spesifik. Di sisi lain, menurut Sugiyono hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Jawaban yang diberikan dikatakan sementara karena hanya didasarkan pada teori yang tepat, bukan fakta empiris yang didapat dari pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat dirumuskan sebagai jawaban teoritis untuk suatu masalah, belum sebagai jawaban yang empiris.⁴⁰ Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H2 : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H4 : Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H5 : Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

⁴⁰ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, (Lumajang: Widya Gama Press, 2021), 53.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Metode pendekatan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode pendekatan yang didasarkan pada filsafat positivisme, filsafat positivisme memandang fenomena dalam penelitian dapat dikategorikan, relatif tepat, konkret, dapat diamati, dan dapat diukur hubungan sebab akibat. Penelitian deskriptif kuantitatif diimplementasikan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang fenomena tersebut dengan memakai tahapan-tahapan pendekatan kuantitatif.⁴¹

2. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi merupakan wilayah generalisasi, terdiri dari objek/subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang telah peneliti pelajari dan putuskan kemudian ditarik sebuah kesimpulan darinya.⁴² Populasi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

⁴¹ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, (Lumajang: Widya Gama Press, 2021),13.

⁴² Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen , Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*”, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 11.
<https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Penelitian+kuantitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjwoPGTilT5AhXLInMBHRBjAxg4AChDoAxoECAAsQAw#V=onepage&q=Penelitian520kuantitatif7f=false>.

Tabel 1.4
Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Lamongan	20.	Kabupaten Tulungagung
2.	Kabupaten Lumajang	21.	Kota Blitar
3.	Kabupaten Madiun	22.	Kota Kediri
4.	Kabupaten Magetan	23.	Kota Madiun
5.	Kabupaten Malang	24.	Kota Malang
6.	Kabupaten Mojokerto	25.	Kota Mojokerto
7.	Kabupaten Nganjuk	26.	Kota Pasuruan
8.	Kabupaten Ngawi	27.	Kota Probolinggo
9.	Kabupaten Pacitan	28.	Kota Surabaya
10.	Kabupaten Pamekasan	29.	Kota Batu
11.	Kabupaten Pasuruan	30.	Kabupaten Bangkalan
12.	Kabupaten Ponorogo	31.	Kabupaten. Banyuwangi
13.	Kabupaten Probolinggo	32.	Kabupaten Blitar
14.	Kabupaten Sampang	33.	Kabupaten Bojonegoro
15.	Kabupaten Sidoarjo	34.	Kabupaten Bondowoso
16.	Kabupaten Situbondo	35.	Kabupaten Gresik
17.	Kabupaten Sumenep	36.	Kabupaten Jember
18.	Kabupaten Trenggalek	37.	Kabupaten Jombang
19.	Kabupaten Tuban	38.	Kabupaten Kediri

Sumber: data diolah peneliti

2) Sampel

Sampel merupakan bagian yang menggambarkan populasi secara umum. Menurut Sugiyono, sampel merupakan komponen suatu bilangan yang memiliki karakteristik suatu populasi.⁴³ Metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh anggota

⁴³ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*, 12.

populasi untuk dijadikan sebagai sampel.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2018-2020, dengan jumlah populasi 38 daerah. Maka jumlah sampel penelitian secara keseluruhan menjadi $3 \times 38 = 114$.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang pokok bahasan atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi ini didapat dari buku, laporan ilmiah, laporan penelitian, esai ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia baik bersumber secara cetak atau elektronik.⁴⁵ Teknik ini dipakai untuk mengambil berbagai referensi untuk memperoleh bukti dan pendapat tertulis tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Dokumenter

Menurut Sukmadinata, studi dokumenter adalah metode pengumpulan data / informasi dengan cara mengumpulkan dan

⁴⁴ Tegor., dkk, “*Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, (Jateng: Lakeisha, 2020), 52. [https://books.google.co.id/books?id=LZIIAAQBA&pg=PT60&dg=sampel+jenuh+menurut+ugiyono+\(2017\)&hl](https://books.google.co.id/books?id=LZIIAAQBA&pg=PT60&dg=sampel+jenuh+menurut+ugiyono+(2017)&hl).

⁴⁵ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 18.

mendeskripsikan hasilnya, baik secara tertulis, bergambar maupun elektronik.⁴⁶ Pengumpulan data pada penelitian ini memakai catatan atau laporan keuangan yang dibuat dan dipublikasikan pada website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

c) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini memakai data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan, dikumpulkan, dan dikelola sebelumnya oleh pihak ketiga.⁴⁷ Sumber data pada penelitian ini merupakan :

- Total realisasi anggaran belanja modal, PAD, DAU, dan DAK yang didapatkan dari data Laporan Realisasi APBD 2018-2020. Data tersebut yang diambil dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui internet.
- Data pertumbuhan ekonomi diambil dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data diartikan sebagai proses pengorganisasian, pengelolaan, dan penggalian hal penting dari data

⁴⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 113. <https://books.google.co.id/books?id=1pWEDwAAQBAJ%pg=PA113%dq=Studi+dokumenter&hl=id&sa=X7ved=2ahUkewicpXm9oT5AhUnTmwgHensD544FBDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=studi520Dokumenter&f=false>.

⁴⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, 27.

yang didapat pada objek, dan menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Didas, Analisis data mengelola data yang didapat dengan menggabungkan variabel penelitian dan menyederhanakan pemahaman struktural yang dipahami oleh semua pihak.⁴⁸ Untuk memudahkan analisis data yang didapat, maka peneliti memakai program software statistik yaitu SPSS (*Statistical Package of Social Science*).

a) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, jumlah, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).⁴⁹ Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

b) Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

⁴⁸ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.
<https://books.google.co.id/books?id=5DE0EAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+data+kuantitatif&hl=id&sa=X&ved=2AhUKEwixj6ntgoX5AhWRR2wGHZHpD9U4ChDoAXoECAMQAw#v=onepage&q&f=false>.

⁴⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, (Semarang : Undip, 2018), 19.

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi secara normal.⁵⁰ Uji normalitas dilakukan dengan memakai *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikansi hasil *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai kurang dari 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki korelasi nol di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan memakai nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Kriteria yang dipakai yaitu:⁵¹

⁵⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, (Semarang : Undip, 2018), 161.

⁵¹ *Ibid.*, 107.

- Apabila nilai VIF disekitar angka 1-10, dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinearitas .
- Apabila nilai Tolerance $\geq 0,10$, dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinearitas .

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk membuktikan apakah terjadi ketidaksamaan varians dari satu penelitian dalam model regresi dengan penelitian lainnya. Apabila varians residual tetap serupa pada setiap penelitian, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika model dapat menunjukkan homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.⁵² Untuk menguji heteroskedastisitas, peneliti memakai grafik *scatterplot*. Jika titik-titik distribusi berdistribusi pada gambar menyebar serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi yaitu untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika ada korelasi, maka terdapat

⁵² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*,

masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena penelitian berturut-turut terkait satu sama lain dari waktu ke waktu.⁵³ Pengujian asumsi ini dapat dilakukan dengan memakai uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu:

- a. Apabila $d < d_L$ artinya terdapat autokorelasi positif
- b. Apabila $d > d_U$ artinya tidak terdapat autokorelasi positif
- c. Apabila $d_L < d < d_U$ artinya pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti
- d. Apabila $(4-d) < d_L$ artinya terdapat autokorelasi negatif
- e. Apabila $(4-d) > d_U$ artinya tidak terdapat autokorelasi negatif
- f. Apabila $d_L < (4-d) < d_U$ artinya pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti.

c) Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linier Sederhana

Model regresi linier sederhana adalah model probabilistik yang menentukan hubungan linier antara dua variabel, dengan asumsi bahwa satu variabel mempengaruhi yang lain. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen, sedangkan

⁵³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*,

variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat.⁵⁴ Analisis regresi linier sederhana ini dipakai untuk membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara parsial. Model probabilistik untuk regresi linier sederhana dirumuskan dalam persamaan :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan :

Y = Belanja modal

X = Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = *error*

2) Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur apakah gabungan dari variabel prediktor memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Penelitian ini memakai empat variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus serta satu variabel dependen yaitu belanja modal.

⁵⁴ Suyono, *Analisis Regresi Untuk Penelitian*, (Sleman : CV. Budi Utama, 2018), 5. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Regresi_untuk_Penelitian/3v1RDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=regresi+linier+sederhana&printsec=frontcover.

Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja modal

X₁ = Pertumbuhan ekonomi

X₂ = Pendapatan asli daerah

X₃ = Dana alokasi umum

X₄ = Dana alokasi khusus

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = *error*

J. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi penjelasan tentang alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika deskripsi pembahasan yaitu berupa deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.⁵⁵ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis, bab ini menyajikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

⁵⁵ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 68.

BAB III :. Penyajian Data dan Analisis, bab ini meliputi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian, dan pembahasan.

BAB IV : Penutup, pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Berikut penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain:

1. Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan (2018), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Hasil analisis secara parsial membuktikan bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus yang mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap anggaran belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian asosiatif kausal. Metode pengambilan sampel memakai teknik sampel jenuh, yaitu teknik yang menggunakan seluruh jumlah populasi sebagai sampel penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu metode pendekatan kuantitatif yang dipakai, metode pengambilan (*sampling jenuh*) dan lima variabel yang sama meliputi pertumbuhan

ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu jenis penelitian dan objek penelitiannya. Apabila pada penelitian ini memakai jenis asosiatif kausal dan memakai objek Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan pada penelitian sekarang memakai jenis penelitian deskripsi dan memakai objek pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.⁵⁶

2. Dewi Malsi Ukamaga (2018), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017)”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

⁵⁶ Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. (Skripsi, Universitas Sumatera, 2018) .

sekarang yaitu sama-sama memakai metode pendekatan kuantitatif, dan empat variabel yang sama meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode pengambilan sampel dan objek penelitiannya. Apabila pada penelitian ini metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling* dan objek penelitiannya pemerintahan kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Sedangkan pada penelitian sekarang metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh* dan objek penelitiannya pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2020.⁵⁷

3. Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Metode

⁵⁷ Dewi Malsi Ukamaga, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017)”, (Skripsi, Universitas Jember, 2018) .

pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Sementara itu, metode pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama memakai metode pendekatan kuantitatif, dan variabel yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada metode pengambilan sampel dan objek penelitiannya. Apabila pada penelitian ini metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling* dan objek di Yogyakarta periode 2011-2016. Sedangkan pada penelitian sekarang metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh* dan objek penelitiannya pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2018-2020.⁵⁸

4. Hanisya Ursilla Lubis (2019), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana

⁵⁸ Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016”, *Jurnal Akuntansi Dewantara* Vol. 2 No. 2 P-ISSN: 2550-0376 E-ISSN: 2549-9637 (Oktober 2018). https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmZhZTVhYTl1MDU2ZGIzZmFjMDk3ZDdlNTU5NjIwYTlkN2ZkZjM0ZA==.pdf.

alokasi khusus, dan dana bagi hasil, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Sedangkan metode pengambilan sampel memakai teknik *sampel jenuh*, yaitu teknik pengambilan sampel menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu metode pendekatan kuantitatif yang dipakai, metode pengambilan sampel (*sampling jenuh*) dan empat variabel yang sama meliputi pertumbuhan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya, jika pada penelitian ini memakai objek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sedangkan pada penelitian sekarang memakai objek pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.⁵⁹

5. Muhammad Syukri, dan Hinaya (2019), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel pendapatan asli daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal ketika model diuji secara parsial. Sedangkan

⁵⁹ Hanisya Ursilla Lubis, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).

pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis penelitian terapan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu metode pendekatan kuantitatif dan variabel penelitian yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini memakai jenis penelitian terapan sedangkan penelitian sekarang memakai jenis penelitian deskripsi, dan perbedaan lainnya terletak pada objek penelitiannya, jika pada penelitian ini memakai objek Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian sekarang memakai objek penelitian di Provinsi Jawa Timur.⁶⁰

6. Beby Agustian Zebua (2020), dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Kabupaten di Sumatera Utara”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan hasil uji secara parsial hanya variabel PDRB dan dana alokasi khusus yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, pendapatan asli

⁶⁰ Muhammad Syukri dan Hinaya, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”, *JEMMA*, Volume 2, Nomor 2, p-ISSN: 2615-1871, e-ISSN: 2615-5850, (September 2019), <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/245/214>.

daerah dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dan termasuk dari jenis penelitian asosiatif. Sedangkan metode pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama memakai metode pendekatan kuantitatif, dan variabel penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu jenis penelitian dan metode pengambilan sampel. Apabila pada penelitian ini memakai jenis penelitian asosiatif dan metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling*. Sedangkan pada penelitian sekarang memakai jenis penelitian deskripsi dan metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh*. Selain itu perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, apabila pada penelitian ini memakai objek Provinsi Sumatera Utara sedangkan pada penelitian sekarang memakai objek pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.⁶¹

7. Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Luptikah (2020), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada

⁶¹ Beby Agustian Zebua, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota di Sumatera Utara”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020).

Kabupaten / Kota Karanganyar Tahun 2017-2019". Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hanya variabel dana alokasi umum yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif. Sementara itu, metode pengambilan sampelnya memakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu metode pendekatan kuantitatif dan empat variabel penelitian yang sama meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode pengambilan sampel dan objek penelitiannya, jika pada penelitian ini metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling* dan objek penelitiannya Kabupaten Karanganyar sedangkan pada penelitian sekarang metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh* dan objek penelitiannya pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur.⁶²

⁶² Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Luptikah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Karanganyar Tahun 2017-2019." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No. 2, ISSN: 2337-568x (Desember 2020): 1-12. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/781>

8. Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu (2021), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pegalokasian Belanja Modal di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020)”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk dari jenis *eksplanatori*. Di sisi lain, metode pengambilan sampel memakai teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Pada penelitian ini memakai program Eviews 11 sebagai alat untuk membantu mengelola data pada analisis regresi data panel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu pada metode pendekatan kuantitatif dan variabel penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu jenis penelitiannya dan metode pengambilan sampelnya, pada penelitian ini memakai jenis penelitian *eksplanatori* dan metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling*. sedangkan penelitian sekarang memakai jenis penelitian deskripsi dan metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh*. Selain itu perbedaan penelitian juga terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian ini memakai

objek pemerintahan daerah provinsi di Indonesia sedangkan penelitian sekarang memakai objek pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.⁶³

9. Ira Safitri (2021), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pegalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019”. Hasil penelitian dengan memakai model *Fixed Effect* variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dan termasuk jenis asosiatif kausal. Sementara itu, metode pengambilan sampelnya memakai teknik sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel memakai seluruh populasi sebagai sampel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian kuantitatif yang dipakai, metode pengambilan sampel (sampling jenuh), dan empat variabel yang sama meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian ini memakai objek

⁶³ Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pegalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020)”, *E-Proceeding of Management* Vol. 8 No. 5 ISSN: 2355-9357, (Oktober 2021), <https://openlibrarypublications.telkom.ac.id/index.php/manajemen/article/view/16494>.

Provinsi Sumatera Utara sedangkan pada penelitian sekarang memakai objek Provinsi Jawa Timur.⁶⁴

10. Dezy Wijyantri dan Jaeni (2022), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi covid-19”. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal sebelum maupun sesudah pandemi covid-19. Sedangkan variabel dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal sebelum maupun sesudah pandemi covid-19. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif. Sementara itu, metode pengumpulan sampel memakai *purposive sampling* yaitu sampel dipilih dengan teknik pengambilan sampel yang bermaksud untuk memungkinkan peneliti mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu metode pendekatan kuantitatif dan variabel penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada metode pengambilan sampel dan objek penelitiannya, jika pada penelitian ini metode pengambilan sampelnya memakai *purposive sampling* dan objeknya pemerintah

⁶⁴ Ira Safitri, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021).

Kabupaten/Kota Se-Jawa tahun 2019-2020 sedangkan pada penelitian sekarang metode pengambilan sampelnya memakai *sampling jenuh* dan objek penelitiannya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019.⁶⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Metode pengambilan sampel 3. 5 variabel yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Objek penelitian
2.	Dewi Malsi Ukamaga (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian kuantitatif 2. 4 variabel yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengambilan sampel 2. Objek penelitian 3. Periode pengambilan data

⁶⁵ Dezy Wijayantri dan Jaeni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi covid-19", *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 1, p-ISSN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398, (Januari, 2022): 1015-1028, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/articel/view/5944/3191>.

		(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017)		
3.	Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Variabel penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengambilan sampel 2. Objek penelitian
4.	Hanisyah Ursilla Lubis (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Metode pengambilan sampel (<i>sampling jenuh</i>) 3. 4 variabel yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian
5.	Muhammad Syukri, dan Hinaya (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Variabel penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Objek penelitian

		kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan .		
6.	Beby Agustian Zebua (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Kabupaten di Sumatera Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Variabel penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Metode pengambilan sampel 3. Objek penelitian
7.	Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Luptikah (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Karanganyar Tahun 2017-2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kuantitatif 2. 4 variabel penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengambilan sampel 2. Objek penelitian
8.	Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pegalokasian Belanja Modal di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. 4 variabel yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian 2. Metode pengambilan sampel 3. Objek penelitian

		Tahun 2019-2020).		
9.	Ira Safitri (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pegalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kuantitatif 2. Metode pengambilan sampel 3. 4 variabel yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian
10.	Dezy Wijyantri dan Jaeni (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi covid-19.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pengambilan sampel 2. Objek penelitian

Sumber: data diolah

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kemampuan ekonom dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penanda kesuksesan pencapaian pembangunan ekonomi pada suatu negara. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan kemampuan jangka panjang pada suatu negara guna memasok jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya dengan jumlah yang lebih banyak, seiring dengan perkembangan teknologi, penyesuaian ideologis dan kelembagaan yang diperlukan.⁶⁶ Sedangkan menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan barang dan jasa riil yang diproduksi suatu negara pada periode waktu tertentu.⁶⁷ Di sisi lain para ekonom sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic development*) didefinisikan sebagai pengembangan produksi barang atau bahan dan jasa dalam periode waktu tertentu. Dengan istilah lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas perekonomian dan terwujud dalam bentuk pengembangan pendapatan nasional.⁶⁸

Teori pertumbuhan ekonomi secara umum dibagi menjadi lima kelompok: teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, endogen dan

⁶⁶ Patta Rappana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 31. <https://books.google.co.id/books?id=dVNtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ekonomi+pembangunan&hl=id&sa=X&ved2ahUKEwj0k9XF16D5AhXVS2wGHb9BB6YQAF6BAgGEAM#v=onepage&q=Ekonomi%20pembangunan&f=false>.

⁶⁷ Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam". (Skripsi, Universitas Sumatera, 2018) , 10.

⁶⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Depok : Kencana, 2017), 232.

eksogen, ekonomi baru, neo-keynesian. Tentang teori pertumbuhan klasik yang dikembangkan oleh tokoh ekonomi di Inggris selama revolusi industri seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil akumulasi modal dan reinvestasi keuntungan dari mengejar spesialisasi, pembagian kerja, dan pengejaran keunggulan komparatif. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menjunjung tinggi gagasan perdagangan bebas antar negara usaha bebas individu, dan menghormati akumulasi milik pribadi.⁶⁹

Teori lain yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi yaitu teori pertumbuhan ekonomi neo klasik. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Trevor Swan dan Robert Solow, teori tersebut menyatakan bahwa ada tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi. Perekonomian mempunyai sumber daya yang terbatas dalam hal modal dan tenaga kerja, tetapi kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan tidak terbatas.

Teori pertumbuhan endogen merupakan teori ekonomi yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari sistem penyebab langsung dan konsekuensi dari proses internal. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa peningkatan modal manusia nasional akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan bentuk-

⁶⁹ Edwin Basmar., dkk, *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15-24.

bentuk teknologi dan alat-alat produksi yang lebih efektif dan efisien. Menurut teori ini, industri berbasis pengetahuan, terutama telekomunikasi, perangkat lunak, dan industri teknologi tinggi lainnya, memainkan peran penting karena mereka menjadi semakin berpengaruh baik di negara maju dan berkembang.

Teori pertumbuhan eksogen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pengaruh eksternal, prinsip utama pertumbuhan eksogen merupakan teori ekonomi neo-klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemajuan teknologi yang tidak tergantung pada kekuatan ekonomi. Model pertumbuhan eksogen merupakan variabel teknologi untuk menentukan faktor-faktor produksi, pengembalian modal yang menurun, tingkat tabungan, dan pertumbuhan ekonomi. Kedua model pertumbuhan eksogen dan endogen menggaris bawahi peran kemajuan teknologi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model pertumbuhan endogen berbeda dari model pertumbuhan eksogen karena kekuatan dalam sistem ekonomi cenderung menciptakan atmosfer untuk kemajuan teknologi.

Pada teori pertumbuhan ekonomi baru menekankan pentingnya kewirausahaan, pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Pengetahuan diperlukan sebagai aset untuk pertumbuhan yang tidak terpengaruh oleh pembatasan atau pengurangan seperti aset lain misalnya modal atau real estat. Teori pertumbuhan ekonomi baru mengasumsikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat mendorong produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip utama dalam teori ini merupakan bahwa persaingan memeras keuntungan, dan orang-orang terus-menerus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu dan menciptakan produk baru untuk memaksimalkan keuntungan.

Meskipun teori pertumbuhan neo-keynesian baru berfokus pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Teori ini menekankan bahwa investasi berperan penting dalam mengatur tingkat pengeluaran pada suatu perekonomian, meskipun hanya menyumbang seperlima hingga seperenam dari total pengeluaran. Namun, suatu investasi dapat menyebabkan ketidakstabilan jika tidak dipertahankan pada tingkat yang cukup untuk merangsang permintaan akan produksi yang dihasilkan.

Menurut Todaro, pertumbuhan ekonomi dari setiap negara memiliki tiga unsur utama, ketiganya yaitu: (1) akumulasi modal, termasuk semua bentuk atau jenis investasi baru yang diinvestasikan dalam tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, (2) pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dengan tingkat akumulasi kapital yang akan meningkat di masa depan, (3) kemajuan dalam teknologi.⁷⁰

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono, merupakan suatu proses peningkatan *output* per kapita yang dihasilkan oleh produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.⁷¹ Sedangkan menurut Arsyad,

⁷⁰ Patta Rappana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, 36.

⁷¹ Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016", *Jurnal Akuntansi Dewantara* Vol. 2 No. 2 P-ISSN: 2550-0376 E-ISSN: 2549-9637 (Oktober 2018).

pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatnya produk domestik bruto/pendapatan nasional bruto, di atas atau dibawah pertumbuhan penduduk, terlepas dari apakah struktur ekonomi berubah atau tidak. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah diukur memakai kenaikan PDRB menurut harga konstan.⁷²

Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto periode t (berdasarkan harga konstan).

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto periode sebelumnya.

Menurut Saad, pertumbuhan ekonomi merupakan dasar pembangunan berkelanjutan sehingga pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, penyediaan perumahan dengan biaya rendah, restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.⁷³

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga memungkinkan

https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmZhZTVhYTI1MDU2ZGIzZmFjMDk3ZDdlNTU5NjIwYTlkN2ZkZjM0ZA==.pdf

⁷² Patta Rappana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, 9.

⁷³ Puput Waryanto, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Pendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 no. 1, (Maret 2017), 40. <https://itrev.kemenkue.go.id/index.php/ITRev/view/13/41>.

pengembangan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak. Pengembangan pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah secara mandiri mendanai pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi tanpa tergantung pada dana lain.⁷⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan investasi swasta dan modal pemerintah, membuat pemerintah lebih fleksibel dan menyiapkan anggaran belanja modal.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang.⁷⁵ Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, layanan kepada masyarakatnya, dan penggunaan sumber daya yang ada.⁷⁶ Menurut Darise, PAD menjadi salah satu sumber pendapatan kas daerah yang harus ditingkatkan untuk memenuhi sebagian biaya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan,

⁷⁴ Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam", (Skripsi, Universitas Sumatera, 2018), 10.

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (20).

⁷⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 18.

sehingga akan menciptakan otonomi daerah yang luas benar, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah sangat bergantung pada PAD untuk mendanai pemerintahan dan pembangunan. Meskipun PAD hanya menyumbang 10% dari keseluruhan pendapatan daerah, namun PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.⁷⁷ PAD merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara keuangan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pendapatan Asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan daerah bagi sebesar-

⁷⁷ Tiffani Dyahnisa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁷⁸ Ririn Anggreani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare", (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 11.

besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁹ Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber pendanaan utama bagi seluruh kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban layanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Seiring dengan pemerintah daerah dalam bentuk, jenis, dan kualitas layanan, penerimaan pajak bagi pemerintah juga harus meningkat. Oleh karena itu, menurut William dan Morse, pajak yaitu pendapatan yang diperoleh memiliki tiga karakteristik, yaitu: pengambilan merupakan kewajiban, diambil oleh pemerintah, dan untuk kepentingan umum.⁸⁰ Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak iklan, pajak hiburan, pajak rumah makan/restaurant dll.

b. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸¹ Retribusi daerah mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Contohnya retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dll.

⁷⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*, Pasal 1 Ayat (5).

⁸⁰ Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 26.

⁸¹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*, Pasal 1 Ayat (6).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁸² Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pengelolaan pelaku ekonomi daerah dan lembaga lain yang dimiliki pemerintah daerah.⁸³ Macam-macam pendapatan ini diklasifikasikan menurut tujuan pendapatan, seperti: pembagian hasil rekening modal Badan Usaha Milik Daerah, pembagian hasil rekening modal Badan Usaha Milik Negara, pembagian hasil rekening modal Badan Usaha Swasta atau kelompok usaha masyarakat. Beberapa keuntungan dari usaha lokal adalah sumber pendapatan asli daerah yaitu jasa keuangan dan perbankan serta bidang lainnya seperti PDAM, industri, pertanian, perkebunan dan jasa lainnya. BUMD adalah salah satu badan usaha yang dipakai untuk melayani penduduk sehingga lebih efisien dan menjadi sumber pendapatan daerah. Berbagai macam pendapatan yang masuk kedalam kategori hasil pengelolaan kekayaan daerah

⁸² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*, Pasal 2 ayat (1).

⁸³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 19.

lainnya yang dipisahkan yaitu keuntungan lain, dividen, dan perusahaan saham milik daerah⁸⁴

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁸⁵ Pendapatan tersebut meliputi pendapatan penjualan aset daerah secara tunai atau secara angsuran, giro, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.⁸⁶

Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus :

$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan$

$Kekayaan\ Daerah\ Yang\ Dipisahkan + Lain-lain\ PAD\ yang\ sah$

Secara sistematis setiap perubahan pendapatan akan berdampak pada belanja atau biaya, tetapi tidak semua pendapatan tambahan akan dialokasikan dalam belanja.

⁸⁴ Santika Adhi Karyadi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 22.

⁸⁵ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*, Pasal 3 ayat (1).

⁸⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 19.

3. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.⁸⁷ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa DAU digunakan sebagai sarana untuk mengatasi ketidakseimbangan keuangan antar daerah dan sumber pendanaan bagi daerah. Besaran DAU ditetapkan dalam APBN, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:⁸⁸

1. Besaran DAU ditetapkan paling kecil 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditentukan APBN.
2. Sebagaimana penjelasan di atas, 10% dan 90% dari DAU ditentukan untuk provinsi, kabupaten dan kota.
3. DAU untuk kabupaten/kota tertentu didapat dengan mengalikan jumlah DAU untuk kabupaten/kota tersebut.
4. Rasio kabupaten/kota di atas digunakan sebagai rasio bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Perhitungan DAU daerah dirumuskan dengan dasar celah fiskalnya, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kemampuan daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan dana pada daerah yang dipakai untuk memenuhi fungsi layanan dasar seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan mengatasi kemiskinan. Jumlah

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (71).

⁸⁸ Dody Dharma Hutabarat., dkk, *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Pendaharaan dan anggaran Negara*”, (Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2021), 19.

pengeluaran untuk beberapa layanan tersebut dipakai untuk nilai kebutuhan fiskal daerah, tetapi diukur berdasarkan total penduduk, luas wilayah, indeks biaya konstruksi, PDRB per kapita dan indeks pembangunan manusia untuk menghitung kenaikan DAU. Kapasitas fiskal di sisi lain, mengacu pada pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan DBH.⁸⁹

Variabel dana alokasi umum diukur dengan rumus :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar DAU yang didapatkan maka semakin besar pula anggaran belanja modalnya. Desentralisasi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga pemerintah tidak akan terus-menerus bergantung pada DAU. Dengan adanya dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat berupa DAU dapat memungkinkan pemerintah daerah lebih banyak menggunakan PAD untuk mendanai belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik.⁹⁰

⁸⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 25.

⁹⁰ Santika Adhi Karyadi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 24.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.⁹¹ Program prioritas nasional yang masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun berjalan. Berdasarkan prioritas tersebut, Menteri mengusulkan langkah-langkah khusus dan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, menyampaikan setiap tindakan khusus yang teridentifikasi tersebut kepada Menteri Keuangan.⁹²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 131 Ayat 3 dana alokasi khusus terdiri dari:

1. DAK fisik merupakan dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. DAK non fisik merupakan dana yang digunakan untuk mendukung operasional layanan publik daerah.
3. Hibah kepada daerah merupakan dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Pasal 1 Ayat (72).

⁹² Dody Dharma Hutabarat., dkk, *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Pendaharaan dan anggaran Negara*”, (Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan, 2021), 21.

tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Ada tiga kriteria untuk menjadi acuan dalam menentukan daerah yang akan mendapatkan alokasi DAK, yaitu:⁹³

1. Kriteria umum

Kriteria umum ditetapkan berdasarkan kinerja keuangan. Hal ini dihitung dengan indeks fiskal netto yang tercermin dalam pendapatan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi kriteria umum dalam indeks fiskal netto tertentu yang ditentukan setiap tahun.

2. Kriteria khusus

Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang yang menerapkan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Peraturan hukum adalah perundang-undang yang mengatur tentang kekhususan daerah, seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Karakteristik daerah ditetapkan dengan indeks wilayah Menteri Keuangan dengan memperhatikan informasi dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/kepala lembaga terkait. Pada tahun 2009 pemerintah menyatakan bahwa wilayah yang akan mendapatkan alokasi DAK yaitu wilayah pesisir dan/atau pulau, wilayah

⁹³ Dody Dharma Hutabarat., dkk, *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Pendaharaan dan anggaran Negara*”, (Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan, 2021), 21-22.

perbatasan dengan negara lain, wilayah rawan bencana, ketahanan pangan dan wilayah pariwisata.

3. Kriteria teknis

Kriteria teknis ditetapkan oleh Menteri yang membidangi dengan memakai indeks teknis berdasarkan indikator kegiatan tertentu yang dibiayai DAK. Kriteria teknis tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pada tahun 2010, terdapat sepuluh bidang DAK yang kriteria teknisnya yaitu pendidikan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, keluarga berencana, sarana dan prasarana perdesaan dan perdagangan.

Alokasi DAK ke suatu daerah berbeda dengan DAU. DAU tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping. Di sisi lain, untuk mendapatkan DAK pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD. Dana pendamping yang disediakan minimal 10% dari alokasi DAK. Namun, jika memiliki kemampuan keuangan tertentu (daerah dimana perbedaan antara pendapatan APBD umum dengan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif) sehingga tidak harus untuk menyediakan dana terkait.⁹⁴

⁹⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 29.

Variabel dana alokasi khusus diukur dengan rumus :

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

Keterangan :

$$\text{Bobot Daerah} = \text{Indeks Fiskal dan Wilayah} \times \text{Indeks Kelemahan}$$

Konstruksi

$$\text{Bobot Teknis} = \text{Indeks Teknis} \times \text{Indeks Kelemahan Konstruksi}$$

Karena DAK lebih condong untuk menambah aset tetap pemerintah yang nantinya akan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga alokasi DAK diharapkan dapat mempengaruhi alokasi anggaran belanja. Penggunaan DAK meliputi pemberian dukungan fasilitas fisik untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan perbaikan fasilitas jangka panjang untuk mendukung sarana dan prasarana fisik berupa penyediaan infrastruktur.⁹⁵

5. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁹⁶ Menurut Halim, Belanja modal yaitu pengeluaran pemerintah daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode anggaran dan meningkatkan aset / kekayaan daerah sehingga dapat mengakibatkan pengeluaran rutin

⁹⁵ Ririn Anggreani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 25.

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, Pernyataan No. 2.

bertambah seperti biaya pemeliharaan untuk mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset.⁹⁷ Berdasarkan pemahaman ini, perlu diketahui tentang aktivitas lain dan kapitalisasi aktiva tetap untuk menentukan apakah biaya dapat dimasukkan sebagai belanja modal. Aset tetap memiliki ciri-ciri yaitu masa manfaat satu tahun atau lebih, nilai relatif yang signifikan yang berkontribusi terhadap aset tetap dan aset milik negara.

Belanja modal dipakai untuk memperoleh aset pemerintah seperti infrastruktur, peralatan, dan aset tetap lainnya. Jika dari segi tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai investasi. Hal ini merupakan salah satu syarat dalam memberikan pelayanan publik. Secara teori, ada beberapa cara untuk mendapatkan aset tetap: membangunnya sendiri, menukarnya dengan aset tetap lainnya atau membelinya. Namun, dalam proses pembelian biasanya dilakukan melalui proses penawaran atau lelang yang cukup rumit.⁹⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran. Belanja modal dapat dikategorikan menjadi 6 kategori utama yaitu sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁷ Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 129.

⁹⁸ Ira Safitri, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021), 22-23.

⁹⁹ Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran*, hal 30-31.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan biaya atau pengeluaran yang dipakai untuk pembelian/pengadaan/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap dipakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap dipakai meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap dipakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Belanja ini termasuk biaya perolehan dan penggantian yang memperpanjang masa manfaat, meningkatkan nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam rangka kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Yang termasuk dalam belanja modal ini yaitu kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala, dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Belanja modal ini termasuk dalam belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyeleggaran operasional BLU.

Variabel belanja modal diukur dengan rumus :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, + Belanja Modal Aset Tetap Lainnya + Belanja Modal Badan Layanan Umum

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana ke APBD. Aset tetap disediakan setiap tahun oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memiliki manfaat keuangan jangka panjang. Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah perlu mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Rusdan Syarif Jambak, “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padangsidempuan”, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021), 24.

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Jawa Timur terletak pada bujur 111,00'-114,04' Bujur Timur dan 7,12'-8,48' Lintang Selatan. Sampai akhir 2021, Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan 47.803,49 km². Instansi/kota terbesar merupakan Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah kurang lebih 5.782,4 km². Sedangkan wilayah terkecil merupakan Kota Mojokerto dengan luas wilayah 20,21 km².¹⁰¹ Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2. Administratif

Secara Administratif, Jawa Timur pada tahun 2021 terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, dan 8.496 desa/kelurahan. Jumlah ini tidak berubah dalam 3 tahun terakhir. Artinya tidak ada pemekaran kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan. Kabupaten/kota dengan kecamatan terbanyak merupakan Kabupaten Malang dengan 33

¹⁰¹ BPS Provinsi Jawa Timur. "Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022. (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022), 4.

kecamatan. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak merupakan Kabupaten Lamongan dengan 474 desa / kelurahan.¹⁰²

3. Kependudukan

Menurut hasil proyeksi interim sensus , jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berdasarkan hasil sekitar 40.666 juta jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar 855 jiwa/km² dan rasio jenis kelamin 99,56. Pada tahun 2021, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar sekitar 2,875 juta jiwa dan Kota Mojokerto memiliki jumlah penduduk paling sedikit sekitar 132 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari tahun 2020 hingga 2021 ada di Kabupaten Bangkalan sekitar 1,43% dan laju pertumbuhan yang paling rendah ada pada Kota Malang sekitar 0,18 %.¹⁰³

4. Keuangan

Keuangan daerah, total realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 34,28 triliun rupiah, dari pendapatan tersebut komponen terbesar merupakan penerimaan asli daerah sejumlah 18,94 triliun rupiah. Di sisi lain realisasi belanja merupakan 33,85 triliun rupiah.¹⁰⁴ Pada tahun 2020 realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berjumlah 89,69 triliun rupiah, dan realisasi belanja sebesar 89,99 triliun rupiah. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya

¹⁰² BPS Provinsi Jawa Timur. "Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022. 16.

¹⁰³ BPS Provinsi Jawa Timur. "Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022. 49.

¹⁰⁴ BPS Provinsi Jawa Timur. "Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022. 17

menghasilkan pendapatan terbesar dengan pendapatan 7,55 triliun rupiah. belanja terbesar juga dicapai Pemerintah Kota Surabaya dengan realisasi belanja sebesar 8,03 triliun rupiah.

B. Penyajian Data

Data penelitian yang dipakai, didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2018-2020, semua data dipublikasikan di website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2018-2020, yaitu meliputi PAD, DAU, DAK, dan Belanja modal. Sedangkan untuk data Pertumbuhan Ekonomi didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 114 (38 kab/kota x 3 tahun penelitian).

Sebelum data dipakai untuk diolah peneliti melakukan *screening* data hal ini dilakukan untuk melihat data yang dipakai berdistribusi normal. Setelah dilakukan *screening* data, dapat diketahui bahwa data dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti melakukan transformasi data yaitu mengubah skala pengukuran data asli dalam bentuk lain, agar data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat (uji asumsi klasik) sebelum masuk ke analisis regresi. Untuk menormalkan data peneliti terlebih dahulu harus mengetahui bentuk grafik histogram dari data yang ada, dengan mengetahui bentuk grafik histogram peneliti dapat menentukan bentuk transformasinya. Dalam penelitian ini peneliti memakai bentuk SQRT (k-x) atau akar kuadrat untuk variabel pertumbuhan ekonomi, karena nilai

pertumbuhan ekonomi pada periode 2020 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, sedangkan untuk variabel bebas lainnya dan variabel terikat memakai bentuk transformasi SQRT (x).

Tabel 3.1
Transformasi Data dalam Bentuk SQRT (Akar Kuadrat)

NO.	SQRT_X1	SQRT_X2	SQRT_X3	SQRT_X4	Y
1.	1,44	20,89	33,85	20,73	23,06
2.	1,58	16,44	31,19	17,51	16,98
3.	1,55	14,80	29,63	17,43	17,08
4.	1,52	14,03	30,00	16,70	13,96
5.	1,40	24,19	40,81	23,52	26,80
6.	1,28	23,37	31,21	18,38	23,54
7.	1,46	19,02	32,55	19,02	18,43
8.	1,52	14,96	32,24	18,29	17,53
9.	1,43	13,61	28,17	16,66	16,49
10.	1,43	14,91	29,15	16,34	17,81
11.	1,33	24,79	34,35	19,67	21,17
12.	1,50	17,00	32,31	20,14	20,08
13.	1,74	15,31	31,10	16,81	15,58
14.	1,84	11,63	28,73	16,72	17,68
15.	1,22	41,06	34,69	20,39	28,47
16.	1,43	13,69	28,40	17,41	19,96
17.	1,97	13,63	33,83	17,84	18,81
18.	1,57	15,29	29,76	17,04	17,65
19.	1,54	21,04	32,07	17,67	22,25
20.	1,52	21,29	33,94	20,94	19,25
21.	1,30	12,77	20,52	10,22	12,65
22.	1,44	15,78	24,64	10,55	11,54
23.	1,24	15,19	22,41	8,41	16,10
24.	1,34	23,60	29,06	13,58	18,74
25.	1,31	13,51	19,75	8,62	10,93
26.	1,40	12,37	20,60	11,15	13,57
27.	1,26	13,26	21,49	10,10	12,76
28.	1,15	70,52	34,81	19,97	49,30
29.	1,00	12,75	21,79	8,82	11,20
30.	1,81	14,12	31,54	16,15	18,02
31.	1,29	21,21	37,09	20,58	21,92
32.	1,55	15,89	33,31	19,55	20,24
33.	1,77	20,62	30,54	18,69	24,52
34.	1,56	14,26	30,17	17,58	16,88
35.	1,30	30,94	30,16	18,17	19,23

36.	1,58	24,44	41,20	21,87	23,07
37.	1,49	20,93	33,04	18,47	17,14
38.	1,56	21,84	35,00	20,16	23,39
39.	1,44	21,73	34,50	19,30	22,15
40.	1,70	17,22	31,77	17,65	15,73
41.	1,45	15,14	30,15	17,65	18,92
42.	1,57	15,41	30,59	16,89	18,69
43.	1,42	24,98	41,58	24,41	28,44
44.	1,30	23,56	31,73	17,96	23,34
45.	1,47	19,19	33,25	19,00	20,86
46.	1,57	15,97	32,80	18,39	19,05
47.	1,56	14,11	28,61	17,17	19,29
48.	1,61	14,82	29,87	16,93	19,99
49.	1,30	25,51	34,97	20,02	21,14
50.	1,58	17,05	32,99	18,46	20,67
51.	1,72	15,67	31,79	18,36	18,92
52.	2,38	12,99	29,50	17,24	19,02
53.	1,23	41,11	35,57	18,15	28,29
54.	1,44	14,31	28,89	16,91	18,83
55.	2,71	15,70	34,57	18,14	19,16
56.	1,56	16,89	30,27	17,78	20,19
57.	1,54	22,76	32,65	17,45	21,78
58.	1,48	22,05	34,57	19,95	15,74
59.	1,29	12,89	20,99	9,24	15,73
60.	1,43	16,33	25,33	11,00	13,52
61.	1,35	15,88	23,02	8,82	17,55
62.	1,33	24,25	29,86	13,79	15,44
63.	1,36	13,88	20,36	7,85	11,60
64.	1,40	12,72	21,16	8,93	12,77
65.	1,25	13,26	21,95	9,42	13,48
66.	1,19	73,36	36,19	19,50	52,48
67.	1,00	13,55	22,35	8,25	11,96
68.	2,55	16,19	32,30	18,30	20,52
69.	1,40	22,26	37,93	20,09	23,01
70.	1,55	16,90	34,04	19,43	22,77
71.	1,08	23,69	31,23	19,27	36,12
72.	1,49	14,78	30,80	19,69	19,64
73.	1,45	31,32	31,07	17,87	23,20
74.	1,41	25,84	42,23	22,37	27,05
75.	1,55	21,83	33,57	18,20	19,36
76.	1,57	21,40	35,74	20,45	24,03
77.	3,19	21,95	33,15	18,23	18,04
78.	3,21	17,33	30,14	16,71	14,08
79.	3,03	16,07	28,63	16,44	15,95

80.	3,02	14,26	29,13	16,47	15,40
81.	3,19	24,16	39,62	21,70	23,74
82.	2,94	23,18	30,26	16,52	17,39
83.	3,04	20,06	31,60	18,82	15,80
84.	3,03	16,43	31,32	17,91	16,76
85.	3,06	12,98	27,20	16,93	11,83
86.	3,17	15,24	28,30	16,06	21,51
87.	3,09	26,46	33,22	19,60	18,77
88.	2,90	17,42	31,50	17,87	16,67
89.	3,10	15,96	30,63	17,64	15,96
90.	2,79	13,25	28,00	15,80	17,19
91.	3,35	42,41	33,91	19,93	22,79
92.	3,14	14,79	27,45	16,63	15,42
93.	2,94	16,13	33,03	17,36	19,33
94.	3,11	16,06	28,89	17,01	15,21
95.	3,66	23,79	31,19	17,46	17,58
96.	3,26	22,60	32,86	19,64	15,70
97.	3,13	13,21	20,02	8,89	10,71
98.	3,71	16,21	24,07	11,74	9,92
99.	3,30	15,78	21,77	8,56	13,82
100.	3,13	22,16	28,37	12,84	19,06
101.	3,35	15,23	19,34	9,34	10,65
102.	3,44	12,04	20,10	8,46	8,73
103.	3,34	13,55	20,93	9,14	9,27
104.	3,52	65,50	34,69	21,00	39,80
105.	3,74	11,69	21,29	7,71	9,70
106.	3,62	15,27	30,55	16,55	13,31
107.	3,33	21,97	36,11	19,80	23,52
108.	3,13	17,39	32,50	18,08	16,49
109.	2,81	26,85	29,59	18,38	37,32
110.	2,98	14,92	29,19	17,77	15,07
111.	3,35	30,41	29,53	16,75	16,78
112.	3,24	24,36	40,15	21,37	13,72
113.	3,08	21,65	31,88	18,37	15,61
114.	3,15	22,24	34,16	19,56	20,02

Sumber: data diolah peneliti

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, jumlah, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).¹⁰⁵ Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

Data yang dipakai dalam penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan_Ekonomi	114	1,00	3,74	2,0602	,85028
PAD	114	11,63	73,36	20,1089	10,11734
DAU	114	19,34	42,23	30,3519	5,14498
DAK	114	7,71	24,41	16,6772	3,94641
Belanja_Modal	114	8,73	52,48	19,0601	6,80718
Valid N (listwise)	114				

Sumber : *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022.

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, (Semarang : Undip, 2018), 19.

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan beberapa sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statisticss Version 23*. Total sampel yang diteliti berjumlah 114. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimalnya 1,00, nilai maksimum 3,74, nilai *mean* 2,0602, dan nilai standar deviasi 0,85028.

2) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statisticss Version 23*. Total sampel yang diteliti berjumlah 114. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimalnya 11,63, nilai maksimum 73,36, nilai *mean* 20,1089, dan nilai standar deviasi 10,11734.

3) Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statisticss Version 23*. Total sampel yang diteliti berjumlah 114. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai minimalnya 19,34, nilai maksimum 42,23, nilai *mean* 30,3519, dan nilai standar deviasi 5,14498.

4) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statisticss Version 23*. Total sampel yang diteliti berjumlah 114. Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai

minimalnya 7,71, nilai maksimum 24,41, nilai *mean* 16,6772, dan nilai standar deviasi 3,94641.

5) Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program IBM SPSS *Statisticss Version 23*. Total sampel yang diteliti berjumlah 114. Variabel belanja modal memiliki nilai minimalnya 8,73, nilai maksimum 52,48, nilai *mean* 19,0601, dan nilai standar deviasi 6,80718.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis dengan memakai analisis regresi linier sederhana dan berganda, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi :

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah variabel residual dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresi.¹⁰⁶ Uji normalitas dilakukan dengan memakai *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan membuat Hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

H_0 diterima jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, tetapi ditolak jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

¹⁰⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, (Semarang : Undip, 2018), 161.

Berdasarkan pengujian dengan SPSS didapat hasil uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* merupakan:

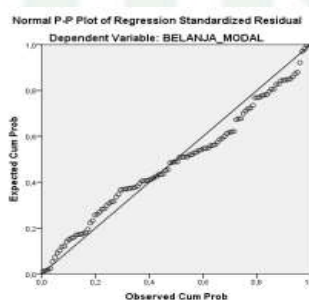
Tabel 3.3
Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Test Statistics	,096
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	,233 ^d

Sumber : *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Hasil pengolahan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Test Statistics K-S memiliki nilai sebesar 0,096 dengan signifikan 0,233 lebih besar dari sig- α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Data normal juga dapat dikonfirmasi dari grafik P-P Plot normalitas seperti berikut:

Gambar 3.1
Grafik P-P Plot Normalitas



Sumber : *Output* SPSS, diolah Penulis,2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa titik-titik data penelitian ditempatkan secara merata sepanjang garis diagonal sehingga

membentuk garis simetris. Hal ini membuktikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki hubungan korelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki korelasi nol di antara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan memakai nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Kriteria yang dipakai yaitu:¹⁰⁷

- Apabila nilai VIF disekitar angka 1-10, dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinearitas .
- Apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$, dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinearitas .

Berdasarkan pengujian dengan SPSS didapat hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

¹⁰⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi* 9, 107.

Tabel 3.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pertumbuhan_Ekonomi	,988	1,012
PAD	,794	1,259
DAU	,107	9,388
DAK	,112	8,934

Sumber : *Output SPSS*, diolah Penulis,2022

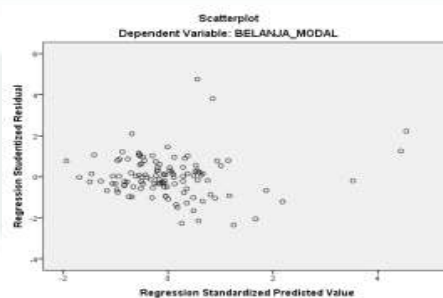
Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih besar dibandingkan dengan 0,10. Yaitu, nilai variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,988, variabel PAD sebesar 0,794, variabel DAU sebesar 0,107, dan variabel DAK sebesar 0,112. Sedangkan nilai VIF variabel berada disekitar angka 1-10 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 1,012, variabel PAD sebesar 1,259, variabel DAU sebesar 9,388, dan variabel DAK sebesar 8,934. Sehingga hasil perhitungan ini memenuhi syarat uji multikolinearitas yakni jika nilai tolerance \geq 0,10, berarti tidak ada masalah multikolinearitas . Nilai VIF disekitar angka 1-10, membuktikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas . Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung indikasi multikolinearitas .

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk membuktikan apakah terjadi ketidaksamaan varians dari satu penelitian dalam model regresi dengan penelitian lainnya. Apabila varians residual tetap serupa pada setiap penelitian, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan baik jika model dapat menunjukkan homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.¹⁰⁸

Untuk menguji heteroskedastisitas, peneliti memakai grafik *scatterplot*. Berikut hasil grafik *scatterplot* berdasarkan pengujian dengan SPSS:

Gambar 3.2
Grafik Scatterplot



Sumber : *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Pada grafik *scatterplot* di atas dapat diketahui bahwa titik distribusi berdistribusi secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

¹⁰⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi*
9, 137

d) Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi yaitu untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika ada korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena penelitian berturut-turut terkait satu sama lain dari waktu ke waktu.¹⁰⁹ Pengujian asumsi ini dapat dilakukan dengan memakai uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*). Berikut hasil uji autokorelasi berdasarkan pengujian dengan SPSS:

Tabel 3.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,124

Sumber : *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Berdasarkan pada tabel Durbin-Watson di atas dengan tingkat nilai signifikansi 5%, total data yang dipakai ($n=114$), dan total variabel independen 4 ($k=4$). Diperoleh nilai untuk batas atas (d_U) yaitu 1,7677 dan untuk batas bawah (d_L) sebesar 1,6227. Dikarenakan nilai Durbin-Watson (d) 2,124 lebih besar dari batas atas (d_U) 1,7438, dan $(4-2,124) > 1,7438$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

¹⁰⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi*
9,111

3. Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linier Sederhana

- Uji Hipotesis Pertama

Pada tabel berikut merangkum hasil dari regresi linier sederhana yang diperoleh dengan memakai program IBM SPSS *Statisticss Version 23* :

Tabel 3.6
Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien Regresi	R ² x ₁ y	Sig	t _{hitung}	Keterangan
Konstanta	23,058		0,000	14,106	
Pertumbuhan Ekonomi	-1,941	0,050	0,009	-2,644	Signifikan

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Melalui hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = 23,058 - 1,941 X_1 + e$$

Nilai konstanta pada tabel di atas sebesar 23,058 dapat diartikan bahwa belanja modal akan memiliki nilai sebesar 23,058 ketika pertumbuhan ekonomi sama dengan nol. Nilai koefisien regresi sebesar -1,941, membuktikan bahwa diantara variabel pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal mempunyai pengaruh negatif (berlawanan arah) Artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka belanja modal

mengalami penurunan 1,941 begitu juga sebaliknya dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_1 y}$) sebesar 0,050 berarti 5% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya 95% dipengaruhi oleh variabel independen lain.

Pertumbuhan ekonomi (X_1) secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} -2,644 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi 0,009. Nilai ini lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,009 < 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

- **Uji Hipotesis Kedua**

Pada tabel berikut merangkum hasil dari regresi linier sederhana yang diperoleh dengan memakai program IBM SPSS *Statistics Version 23* :

Tabel 3.7
Uji Regresi Linier Sederhana Variabel PAD

Variabel	Koefisien Regresi	$R^2_{x_2 y}$	Sig	t_{hitung}	Keterangan
Konstanta	8,036		0,000	9,694	
PAD	0,548	0,661	0,000	14,875	Signifikan

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis, 2022

Melalui hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = 8,036 + 0,548 X_2 + e$$

Nilai konstanta pada tabel di atas sebesar 8,036 dapat diartikan bahwa belanja modal akan memiliki nilai sebesar 8,036 ketika PAD sama dengan nol. Nilai koefisien regresi sebesar 0,548, artinya apabila PAD naik sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat 0,548 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_2 y}$) sebesar 0,661 berarti 66,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel PAD sedangkan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

PAD (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 14,875 > t_{tabel} 1,98099 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

- **Uji Hipotesis Ketiga**

Pada tabel berikut merangkum hasil dari regresi linier sederhana yang diperoleh dengan memakai program IBM SPSS *Statistics Version 23* :

Tabel 3.8
Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAU

Variabel	Koefisien Regresi	$R^2_{x_3 y}$	Sig	t_{hitung}	Keterangan
Konstanta	-4,595		0,142	-1,478	
DAU	0,779	0,341	0,000	7,714	Signifikan

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Melalui hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = -4,595 + 0,779 X_3 + e$$

Nilai konstanta pada tabel di atas sebesar -4,595 dapat diartikan bahwa belanja modal akan memiliki nilai sebesar -4,595 ketika DAU sama dengan nol. Nilai koefisien regresi sebesar 0,779, artinya apabila DAU naik sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat 0,779 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_3 y}$) sebesar 0,341 berarti 34,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAU sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

DAU (X_3) secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} $7,714 > t_{tabel}$ $1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000$. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan $0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

- **Uji Hipotesis Keempat**

Pada tabel berikut merangkum hasil dari regresi linier sederhana yang diperoleh dengan memakai program IBM SPSS *Statistics Version 23* :

Tabel 3.9
Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DAK

Variabel	Koefisien Regresi	$R^2_{x_4 y}$	Sig	t_{hitung}	Keterangan
Konstanta	2,189		0,335	0,968	
DAK	1,012	0,338	0,000	7,663	Signifikan

Sumber: *Output* SPSS, diolah Penulis, 2022

Melalui hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = 2,189 + 1,012 X_4 + e$$

Nilai konstanta pada tabel di atas sebesar $2,189$ dapat diartikan bahwa belanja modal akan memiliki nilai sebesar $2,189$ ketika DAK sama dengan nol. Nilai koefisien regresi sebesar $1,012$, artinya apabila DAK naik sebesar 1% maka

belanja modal akan ikut meningkat 1,012 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_4 y}$) sebesar 0,338 berarti 33,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAK sedangkan sisanya 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

DAK (X_4) secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 7,663 > t_{tabel} 1,98099 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang menyatakan bahwa variabel DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

b) Uji Regresi Linier Berganda

Pada tabel berikut merangkum hasil dari regresi linier berganda yang diperoleh dengan memakai program IBM SPSS *Statistics Version 23* :

Tabel 3.10
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	$R^2_{x_4 y}$	Sig	F_{hitung}	Keterangan
Konstanta	6,657	0,778	0,000	100,188	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	-1,673				
PAD	0,470				
DAU	-0,209				
DAK	0,764				

Sumber: *Output SPSS*, diolah Penulis, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda pada tabel di atas, hubungan antara variabel independen dan variabel terikat yang dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 6,657 - 1,673 X_1 + 0,470 X_2 - 0,209 X_3 + 0,764 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta 6,657 membuktikan nilai belanja modal sebesar 6,657 jika terdapat variabel independen (pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK = 0).
2. Nilai koefisien regresi pada pertumbuhan ekonomi (β_1) sebesar -1,673 membuktikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah). Artinya, jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka sebaliknya belanja modal mengalami penurunan 1,673 dengan asumsi variabel independen lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi pada PAD (β_2) sebesar 0,470, artinya setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka belanja modal akan ikut mengalami peningkatan sebesar 0,470 dengan asumsi variabel independen lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi pada DAU (β_3) sebesar -0,209 membuktikan antara variabel DAU dan belanja modal terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah). Artinya, jika DAU naik 1%

maka sebaliknya belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 25,7% dengan asumsi variabel independen lain tetap.

5. Nilai koefisien regresi pada DAK (β_4) sebesar 0,764, artinya setiap kenaikan DAK 1% maka belanja modal akan ikut mengalami peningkatan sebesar 0,764 dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Nilai Koefisien determinan pada tabel di atas sebesar 0,778 berarti dapat diartikan bahwa 77,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variasi empat variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji statistik F pada tabel di atas membuktikan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 100,188 lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} ($100,188 > 2,68$) dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, variabel independen pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2018-2020, maka dilakukan pembahasan berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} -2,644 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikan sebesar $0,009$. Nilai ini lebih kecil dibandingkan $0,05$ ($0,009 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah $-1,941$, memiliki arti bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka sebaliknya belanja modal mengalami penurunan $1,941$ dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nilai koefisien determinan ($R^2_{x_1 y}$) sebesar $0,050$ berarti 5% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya 95% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nilai koefisien pada penjelasan di atas bernilai negatif yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka belanja modal mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi

penduduk membuat pembiayaan dalam pengalokasian anggaran belanja modal menurun.

Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah harus mendistribusikan dana ke APBD dalam wujud anggaran belanja modal. Anggaran belanja modal dilandaskan pada kebutuhan daerah akan fasilitas, yaitu kebutuhan daerah untuk keberhasilan pelaksanaan misi pemerintah dan pelayanan publik. Supaya dapat meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu menggeser komposisi belanja daerah. Sebab pengeluaran daerah selama ini cenderung dipakai untuk pengeluaran rutin yang kurang efektif terlebih karena adanya pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak mengeluarkan anggaran belanja daerahnya untuk menangani covid-19.

Menurut Astera Prima Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam webinar *Outlook Pajak Daerah Pasca UU HKPD*, beliau mengatakan bahwa belanja infrastruktur atau belanja modal terbilang masih rendah sekitar 11% jika dibandingkan dengan belanja pegawai. Karena sekitar 34-64% dana yang diberikan pemerintah pusat dipakai untuk belanja pegawai.

Pelaksanaan belanja modal sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peningkatan anggaran belanja modal dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya kepercayaan penduduk terhadap pemerintah daerah. Dengan

meningkatkan belanja modal dalam wujud konstruksi, irigasi, jalan, infrastruktur, dan lain-lain dapat meningkatkan pelayanan publik yang memberikan manfaat langsung kepada penduduknya dibandingkan dengan belanja rutin. Sehingga dapat dikatakan, apabila nilai belanja modal dan belanja barang dan jasa rendah maka akan semakin buruk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi Malsi Ukamaga (2018), Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), Beby Agustian Zebua (2020), Dezy Wijyantri dan Jaeni (2022), yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja modal.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasin Belanja Modal.

Melalui analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H₂ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} 14,875 > t_{tabel} 1,98099 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 0,548, artinya setiap kenaikan PAD sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 0,548 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_2 y}$) sebesar 0,661 berarti 66,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel PAD sedangkan sisanya 33,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Koefisien bernilai positif artinya dengan meningkatnya PAD maka belanja modal juga meningkat dan begitu juga sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi PAD maka alokasi anggaran pada belanja modal akan semakin tinggi pula. Selain itu, belanja modal yang dibiayai PAD akan mengurangi pos anggaran lainnya.

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan dari sumber dana yang digunakan untuk mendanai belanja modal. Pendapatan asli daerah tersebut berasal dari kontribusi pajak, retribusi daerah, kinerja usaha daerah, kinerja administrasi dan aset daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik yang berkualitas, yang dapat diwujudkan melalui belanja modal. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah akan mampu membiayai sendiri pengeluarannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintah daerah dapat mandiri terhadap manajemen keuangan daerahnya yang bersifat transparansi dan akuntabel.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan (2018), Hanisya Ursilla Lubis (2019), Muhammad Syukri dan Hinaya (2019), Ira Safitri (2021), Dezy Wijayantri dan Jaeni (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Melalui analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,714 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 0,779, artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 0,779 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_3 y}$) sebesar 0,341 berarti 34,1% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAU sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel independen lain.

Koefisien bernilai positif, dengan kata lain ketika DAU meningkat belanja modal juga meningkat dan sebaliknya. Ini menjelaskan bahwa dana transfer DAU yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan mengakibatkan pengembangan alokasi belanja modal, dan juga mendukung pos pendapatan alokasi belanja daerah.

Pemerintahan daerah otonom memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DAU yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah terkait dengan desentralisasi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Denny Mahendra dan Nursita Wulandari Lupikah (2020), Ira Safitri (2021) Hanisya Ursilla Lubis (2019), dan Dezy Wijayantri dan Jaeni (2022) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Melalui analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H₄ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,663 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi adalah 1,012, artinya setiap kenaikan DAK sebesar 1% maka belanja modal akan ikut meningkat sebesar 1,012 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien determinan ($R^2_{x_4 y}$) sebesar 0,338 berarti 33,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variabel DAK sedangkan sisanya 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Koefisien bernilai positif, dengan kata lain ketika DAK meningkatnya belanja modal meningkat dan sebaliknya. Ini menjelaskan bahwa dana transfer berupa DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan alokasi

belanja modal dan mendukung pos pendapatan dalam alokasi belanja daerahnya.

Adanya alokasi DAK yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal mengakibatkan pelayanan publik semakin meningkat, karena DAK lebih condong menambah aset tetap dimiliki pemerintah. Penggunaan DAK meliputi pemberian dukungan fasilitas fisik untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan perbaikan fasilitas jangka panjang untuk mendukung sarana dan prasarana fisik berupa penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan tujuan utama DAK untuk pembiayaan layanan dasar bagi masyarakat yang tidak memenuhi standar termasuk ketentuan untuk mendukung standar atau mendorong percepatan pembangunan masyarakat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ahmad Luthfi Hasudungan Pohan (2018), Hanisya Ursilla Lubis (2019), Beby Agustian Zebua (2020), Hanjelin Noviarti dan Sri Rahayu (2021), Ira Safitri (2021), Dezy Wijayantri dan Jaeni (2022) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

Hasil dari uji statistik F membuktikan bahwa semua variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} 100,188 lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} ($100,188 > 2,68$) dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Serta nilai koefisien determinan sebesar 0,778 berarti 77,8% variasi belanja modal dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), dan Beby Agustian Zebua (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} -2,644 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai ini lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,009 < 0,05$). Nilai koefisien regresi merupakan -1,941, menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka belanja modal akan mengalami penurunan 1,941 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 14,875 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi merupakan 0,548, menunjukkan bahwa kenaikan PAD sebesar 1% maka belanja modal meningkat sebesar 0,548 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

3. Variabel Dana Alokasi Umum (X3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,714 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi merupakan 0,779, menunjukkan bahwa kenaikan DAU sebesar 1% maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,779 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4) secara parsial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} 7,663 > t_{tabel} 1,98099$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai koefisien regresi merupakan 1,012, menunjukkan bahwa kenaikan DAK sebesar 1% maka belanja modal akan meningkat sebesar 1,012 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai $F_{hitung} 100,188$ lebih besar dibandingkan dengan $F_{tabel} (100,188 > 2,68)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Serta nilai koefisien

determinan sebesar 0,778 berarti 77,8% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK dan sisanya 22,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

1. Belanja modal adalah salah satu pengeluaran pemerintah yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode anggaran. Selain itu, belanja modal dirancang berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah harus merubah komposisi belanja daerah yang lebih banyak digunakan untuk pengeluaran harian yang relatif tidak produktif. Menurut Sarangih dalam penelitian Rusdan Syarif Jambak, seharusnya penggunaan belanja modal harus dipakai untuk hal-hal produktif seperti menyediakan pembangunan infrastruktur, irigasi, jalan dan lain-lain yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat dibandingkan dengan belanja rutin. Alokasi yang tepat sasaran dan standar yang tinggi dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Menurut Darise dalam penelitian Tiffani Dyahnisa, PAD menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang perlu adanya peningkatan untuk memenuhi beberapa biaya pemeliharaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin

mandiri secara keuangan daerah tersebut dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan menyediakan layanan untuk masyarakat. Meskipun PAD hanya 10% dari keseluruhan pendapatan daerah, tetapi anggaran PAD yang dialokasikan berkontribusi secara signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. DAU dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar daerah. Sedangkan DAK dilalokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan atau kebijakan prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, DAK lebih condong untuk menambah aset tetap pemerintahan sehingga meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan DAK meliputi pemberian dukungan fasilitas fisik untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan perbaikan fasilitas jangka panjang untuk mendukung sarana dan prasarana fisik berupa penyediaan infrastruktur sehingga diharapkan dapat digunakan secara tepat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya mengambil data penelitian dari salah satu website saja namun juga menggunakan website lainnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Selain itu,

peneliti juga harus menghitung kembali data tersebut sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan supaya data tersebut lebih akurat dan terpercaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan Emerald. "Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2021 Tertinggi Nasional". *Republika* online. Diakses 07 Januari 2022. <https://m.republika.co.id/amp/r5alq3349>.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggreani, Ririn. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare". Skripsi, UIN Parepare.
- Ariadi, Wa. 2021. *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aryani, Putri Retno dan Kurnia Krisna Hari. 2019. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* Vol. 24 No.2. <https://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak/article/download/3/95>.
- Ayem, Sri, dan Dessy Dyah Pratama. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016". *Jurnal Akuntansi Dewantara* Vol. 2 No. 2 P-ISSN: 2550-0376 E-ISSN: 2549-9637 https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmZhZTVhYTI1MDU2ZGIzZmFjMDk3ZDdINTU5NjIwYTlkN2ZkZjM0ZA==.pdf.
- Badan Pusat Statistik. "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Tahun 2021". Diakses 03 April 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data-pub.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2022. *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2022*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah, 2016-2020)". Diakses 3 April 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/06/23/2161/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-miliar-rupiah-2016-2020.htm>.

- Basmar, Edwin., Sri Harianti, Abdul Rahman Sulaeman, Annisa Ilmi Faried, Darwin Damanik, Amruddin Bonaraja Purba, Nugrahini susanti, dan Nur arif nugraha. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Strategi dan Kebijakan*. Makasar: Yayasan Kita Menulis.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. “Portal Data APBD”. Diakses 9 Mei 2022. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi13&pemda=35>.
- Dyahnisa, Tiffani. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Frisdiantara, Christea, dan Imam Mukhlis. 2016. *Ekonomi Pembangunan sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Universitas Kanjuruhan.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang : Undip.
- Herlin, Faradilla., Ratih Rosita, dan Hasan Basri. 2021. *Keuangan Daerah*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Hutabarat, Dody Dharma., Windasena Winarno, dan Rizky Diananto. 2021. *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Ismail, Tjip. 2018. *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jambak, Rusdan Syarif. 2021. “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Padangsidempuan”. Skripsi, IAIN Padangsidempuan.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. 2021. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2021*. Surabaya: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <http://djpk.kemenkue.go.id>.

- Karyadi, Santika Adhi. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*.
- Lubis, Hanisya Ursilla. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara.
- Mahendra, Denny, dan Nursita Wulandari Luptikah. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Karanganyar Tahun 2017-2019”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No. 2, ISSN: 2337-568x. <https://e-jurnal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/781>.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Mundiroh, Siti. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah”. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* vol. 2, No. 1. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2528/pdf>.
- Noviarti, Hanjelin, dan Sri Rahayu. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pegalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020)”. *E-Proceeding of Management* Vol. 8 No. 5 ISSN: 2355-9357. <https://openlibrarypublications.telkom.ac.id/index.php/manajemen/article/view/16494>.

- Paramita, Ratna Wijayanti Daniar., dkk. 2021 *Metode Penelitian Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Pohan, Ahmad Luthfi Hasudungan. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam”. Skripsi, Universitas Sumatera.
- Purba, Elidawaty Purba., dkk. 2021 *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
<https://books.google.co.id/books?id=5DE0EAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+data+kuantitatif&hl=id&sa=X&ved=2AhUKEwixj6ontgoX5AhWRR2wGHZHpD9U4ChDoAXoECAMQAw#v=onepage&q&f=false>.
- Raharjo, Agus. “Ketua Komisi XI: RUU HKPD Perkuat Desentralisasi Fiskal, RUU HKPD Diharapkan Meningkatkan Pemerataan Masyarakat Se-Indonesia”. Republika Online. Diakses 01 September 2022.
<https://www.republika.co.id/berita/r2bt436/ketua-komisi-xi-ruu-hkpd-perkuat-desentralisasi-fiskal>.
- Rappana, Patta, dan Zulfikry Sukarno. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makasar: CV Sah Media.
<https://books.google.co.id/books?id=dVNtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ekonomi+pembangunan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj0k9XF16D5AhXVS2wGHb9BB6YQAF6BAgGEAM#v=onepage&q=Ekonomi%20pembangunan&f=false>.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen , Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Penelitian+kuantitatif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjwoPGTiT5AhXL1nMBHRBjAyg4AChDoAxoECAsQAw#v=onepage&q=Penelitian520kuantitatif7f=false>.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Sleman: CV Budi Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=1pWEDwAAQBAJ%pg=PA113%dq=Studi+dokumenter&hl=id&sa=X7ved=2ahUkewicpXm9oT5AhUnTmwgHensD544FBD0AXoECAIQAw#v=onepage&q=studi520Dokumente r&f=false>.

- Safitri, Ira. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No. 2.*
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Sianturi, Heriston, dan Anastasya Astrid Eka Putri. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Banten)”. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*.1. no.3. <https://www.lppm.usni.ac.id>.
- Sudaryo, Yoyo., dkk. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suyono. 2018. *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Sleman : CV. Budi Utama.. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Regresi_untuk_Penelitian/3vIRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=regresi+linier+sederhana&printsec=frontcover
- Syahdila, Anika, Muctolifah, dan Sishadiyat. 2021. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal”. *Jembura Economic Education Journal*, Volume 3 No. 2, E-ISSN: 2656-4378, P-ISSN: 2655-5689. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/article/view/10985>.
- Syukri, Muhammad, dan Hinaya. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan”. *JEMMA*, Volume 2, Nomor 2, p-ISSN: 2615-1871, e-ISSN: 2615-5850. <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/articel/view/245/214>.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

- Tegor., dkk. 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. Jateng: Lakeisha. [https://books.google.co.id/books?id=LZIIIEAAQBA&pg=PT60&dg=sampel+jenuh+menurut+sugiyono+\(2017\)&hl](https://books.google.co.id/books?id=LZIIIEAAQBA&pg=PT60&dg=sampel+jenuh+menurut+sugiyono+(2017)&hl).
- Ukamaga, Dewi Malsi. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017)”. Skripsi, Universitas Jember.
- Wijayantri, Dezy, dan Jaeni. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Sebelum dan Masa Pandemi covid-19”. *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7, No. 1, p-ISSN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/articel/view/5944/3191>.
- Waryanto, Puput. 2017. “Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 no. 1. <https://itrev.kemenkue.go.id/index.php/ITRev/view/13/41>.
- Zebua, Beby Agustian. 2020. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota di Sumatera Utara”. Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erina Setiana Putri

NIM : E20183035

Prodi/ jurusan : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dari sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



METERAN
TEMPEL
KICIAJ082094870

Erina Setiana Putri
E20183035

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Matrik Penelitian

NO.	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020).	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus 5. Belanja Modal	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah 3. Celah Fiskal dan Alokasi Dasar 4. Kriteria Umum, Kriteria Khusus, Kriteria Teknis. 5. Belanja Tanah,	1. Data sekunder bersumber dari Data Laporan Realisasi APBD tahun 2018-2020, yang didapat dari situs Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari dokumen ini didapat data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana	1. Pendekatan penelitian: pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan yang dibantu dengan SPSS 23. 2. Populasi dan sampel: populasi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, pengambilan sampel memakai metode <i>sampling jenuh</i> . 3. Teknis	1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur? 2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur? 3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur? 4. Apakah dana alokasi

			<p>Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p>	<p>Alokasi Khusus (DAK). Data Pertumbuhan Ekonomi didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).</p>	<p>pengumpulan data yang dipakai yaitu studi pustaka, dan studi dokumenter</p> <p>4. Analisis Data</p> <p>a. Statistik Deskriptif</p> <p>b. Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi</p> <p>c. Uji Hipotesis :</p> <p>Analisis Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda.</p>	<p>khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur?</p> <p>5. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi pada pemerintahan Kabupaten / Kota di Jawa Timur?</p>
--	--	--	---	---	---	--

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	18 April 2022	Mencari dan mengunduh data PDRB per kapita atas harga konstan periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Badan Pusat Statistik
2.	24-26 April 2022	Mencari dan mengolah data pendapatan asli daerah pada laporan realisasi APBD periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
3.	27-29 April 2022	Mencari dan mengolah data belanja modal yang terdapat dalam laporan realisasi APBD periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
4.	10-12 Mei 2022	Mencari dan mengolah data dana alokasi umum pada laporan realisasi APBD periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
5.	13-15 Mei 2022	Mencari dan mengolah data dana alokasi khusus pada laporan realisasi APBD periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
6.	22 Mei 2022	Mengelola data PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal menggunakan program IBM SPSS versi 23 untuk statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, dan uji regresi linier berganda
7.	7 Agustus 2022	Mencari dan mengunduh data pertumbuhan ekonomi pada periode 2018-2020 yang terdapat dalam website Badan Pusat Statistik dikarenakan data baru dipublikasikan
8.	8 Agustus 2022	Mengelola data pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal menggunakan program IBM SPSS versi 23 untuk statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, dan uji regresi linier berganda



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nikmatul Masrurroh, M.E.I
Jabatan : Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Erina Setiana Putri
NIM : E20183035
Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Agustus 2022

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ekonomi Islam,



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nama : Erina Setiana Putri
No. Induk Mahasiswa : E20183035
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)
Pembimbing : Nur Ika Mauliyah, SE, M. AK
Tanggal Persetujuan : Tanggal 17 Januari 2022 s/d 27 Januari 2022

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	17 Januari 2022	Konsultasi dan Bimbingan Proposal Pertama (Revisi Latar Belakang, Fotnote, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka)	
2.	26 Januari 2022	Konsultasi dan Bimbingan Proposal Kedua (Revisi Latar Belakang Membuat Diagram, Kajian Teori Bab Penelitian Terdahulu)	
3.	27 Januari 2022	Konsultasi dan Bimbingan Proposal Ketiga (Acc Ujian Seminar Proposal)	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

a.n. Dekan
Ketua Prodi Akuntansi Syariah

Daru Anondo, SE., M.Si
NIP. 197503032009011009

KL

Q

JEMBER



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember**

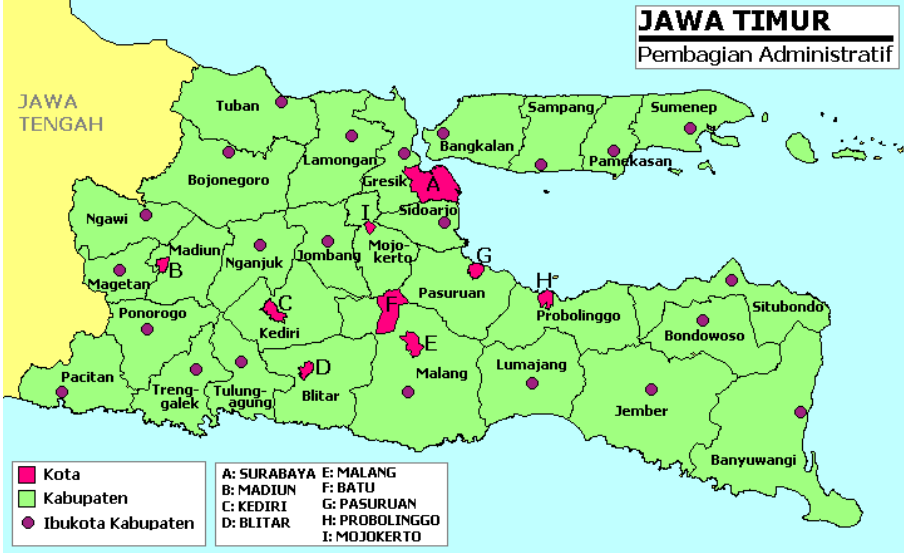
Nama : Erina Setianna Putri
No. Induk Mahasiswa : E20183035
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Periode 2018-2020)
Pembimbing : Nur Ika Mauliyah, SE, M. AK
Tanggal Persetujuan : Tanggal 21 Juni 2022 s/d 10 Agustus 2022

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21 Juni 2022	Konsultasi dan bimbingan Skripsi	f
2.	15 Juli 2022	Revisi Skripsi motto, Abstrak, Bab 1 dan 2	f
3.	23 Juli 2022	Bimbingan Skripsi bab 3 analisis dan pengujian Hipotesis	f
4.	1 Agustus 2022	Revisi skripsi bab 3-4	f
5.	4 Agustus 2022	Revisi skripsi bab 3 dan penambahan periode pada judul dan rumusan masalah	f
6.	8 Agustus 2022	Konsultasi mengenai perubahan data pada variabel pertumbuhan Ekonomi	f
7.	10 Agustus 2022	Acc Skripsi	f
8.			
9.			
10.			

a.n. Dekan
PLT Koordinator Prodi Akuntansi Syariah


Nur Ika Mauliyah, SE, M. AK
NIP.198803012018012001

PETA PROVINSI JAWA TIMUR



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2020 (dalam persen)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Lamongan	5,44	5,43	-2,65
2.	Lumajang	5,00	4,61	-2,79
3.	Madiun	5,10	5,42	-1,69
4.	Magetan	5,21	5,04	-1,64
5.	Malang	5,55	5,49	-2,68
6.	Mojokerto	5,88	5,81	-1,11
7.	Nganjuk	5,38	5,36	-1,71
8.	Ngawi	5,21	5,05	-1,69
9.	Pacitan	5,47	5,08	-1,84
10.	Pamekasan	5,46	4,92	-2,54
11.	Pasuruan	5,73	5,83	-2,03
12.	Ponorogo	5,27	5,01	-0,90
13.	Probolinggo	4,47	4,56	-2,12
14.	Sampang	4,11	1,85	-0,29
15.	Sidoarjo	6,01	5,99	-3,69
16.	Situbondo	5,46	5,44	-2,33
17.	Sumenep	3,63	0,14	-1,13
18.	Trenggalek	5,03	5,08	-2,17
19.	Tuban	5,15	5,14	-5,85
20.	Tulungagung	5,21	5,32	-3,09
21.	Kota Blitar	5,82	5,84	-2,28
22.	Kota Kediri	5,43	5,47	-6,25
23.	Kota Madiun	5,96	5,69	-3,39
24.	Kota Malang	5,72	5,73	-2,26
25.	Kota Mojokerto	5,80	5,65	-3,69
26.	Kota Pasuruan	5,54	5,56	-4,33
27.	Kota Probolinggo	5,93	5,94	-3,64
28.	Kota Surabaya	6,19	6,09	-4,85
29.	Kota Batu	6,50	6,51	-6,46
30.	Bangkalan	4,22	1,03	-5,59
31.	Banyuwangi	5,84	5,55	-3,58
32.	Blitar	5,10	5,12	-2,29
33.	Bojonegoro	4,39	6,34	-0,40
34.	Bondowoso	5,08	5,30	-1,36
35.	Gresik	5,81	5,42	-3,68
36.	Jember	5,02	5,51	-2,98
37.	Jombang	5,29	5,10	-1,98
38.	Kediri	5,07	5,06	-2,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022 (data diolah).

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2020 (dalam miliar)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Lamongan	436,6	472,0	481,8
2.	Lumajang	270,2	296,5	300,3
3.	Madiun	219,0	229,2	258,2
4.	Magetan	196,8	237,4	203,5
5.	Malang	585,3	623,8	583,9
6.	Mojokerto	546,3	555,0	537,3
7.	Nganjuk	361,6	368,3	402,4
8.	Ngawi	223,9	255,1	270,0
9.	Pacitan	185,2	199,0	168,5
10.	Pamekasan	222,4	219,7	232,3
11.	Pasuruan	614,3	650,9	700,2
12.	Ponorogo	289,0	290,8	303,3
13.	Probolinggo	234,5	245,4	254,9
14.	Sampang	135,4	168,8	175,5
15.	Sidoarjo	1685,6	1690,0	1798,5
16.	Situbondo	187,3	204,7	218,9
17.	Sumenep	185,8	246,4	260,3
18.	Trenggalek	233,8	285,1	258,0
19.	Tuban	442,5	518,0	566,1
20.	Tulungagung	453,2	486,4	510,6
21.	Kota Blitar	163,0	166,1	174,6
22.	Kota Kediri	249,1	266,8	262,9
23.	Kota Madiun	230,9	252,1	248,9
24.	Kota Malang	556,9	588,1	491,2
25.	Kota Mojokerto	182,5	192,7	231,9
26.	Kota Pasuruan	153,0	161,7	145,0
27.	Kota Probolinggo	175,8	175,8	183,7
28.	Kota Surabaya	4972,9	5381,9	4290,0
29.	Kota Batu	162,6	183,7	136,8
30.	Bangkalan	199,3	262,3	233,2
31.	Banyuwangi	450,1	495,7	482,7
32.	Blitar	252,5	285,7	302,5
33.	Bojonegoro	425,2	561,3	720,9
34.	Bondowoso	203,2	218,5	222,7
35.	Gresik	957,3	980,8	924,7
36.	Jember	597,5	667,6	593,2
37.	Jombang	438,2	476,7	468,6
38.	Kediri	476,9	457,8	494,4

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 (data diolah).

**Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2018-2020 (dalam miliar)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Lamongan	1146,2	1190,4	1099,0
2.	Lumajang	972,9	1009,2	908,2
3.	Madiun	877,9	908,9	819,5
4.	Magetan	900,0	935,5	848,8
5.	Malang	1665,2	1728,9	1571,0
6.	Mojokerto	973,8	1006,9	915,5
7.	Nganjuk	1059,8	1105,5	998,8
8.	Ngawi	1039,6	1075,6	980,8
9.	Pacitan	793,7	818,5	739,9
10.	Pamekasan	849,8	892,3	800,7
11.	Pasuruan	1179,8	1223,1	1103,3
12.	Ponorogo	1043,9	1088,2	992,3
13.	Probolinggo	967,4	1010,7	938,2
14.	Sampang	825,4	870,1	784,1
15.	Sidoarjo	1203,7	1265,6	1149,8
16.	Situbondo	806,7	834,5	753,7
17.	Sumenep	1144,5	1195,1	1090,9
18.	Trenggalek	885,6	916,3	834,6
19.	Tuban	1028,4	1066,1	972,9
20.	Tulungagung	1152,0	1195,4	1079,9
21.	Kota Blitar	421,2	440,6	400,9
22.	Kota Kediri	606,9	641,4	579,1
23.	Kota Madiun	502,4	530,0	473,9
24.	Kota Malang	844,6	891,7	805,1
25.	Kota Mojokerto	390,1	414,4	373,9
26.	Kota Pasuruan	424,5	447,6	403,9
27.	Kota Probolinggo	462,0	481,6	438,3
28.	Kota Surabaya	1211,7	1309,5	1203,5
29.	Kota Batu	474,9	499,5	453,3
30.	Bangkalan	994,5	1043,5	933,5
31.	Banyuwangi	1375,8	1438,5	1303,6
32.	Blitar	1109,8	1159,0	1056,0
33.	Bojonegoro	932,5	975,4	875,3
34.	Bondowoso	910,3	948,7	851,8
35.	Gresik	909,9	965,2	872,0
36.	Jember	1697,5	1783,4	1611,7
37.	Jombang	1091,8	1127,0	1016,6
38.	Kediri	1225,3	1277,5	1166,6

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 (data diolah)

**Dana Alokasi Khusus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2018-2020 (dalam miliar)**

No.	Nama Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Lamongan	429,8	372,5	332,4
2.	Lumajang	306,7	311,6	279,3
3.	Madiun	303,8	311,6	270,4
4.	Magetan	278,7	285,3	271,4
5.	Malang	553,0	595,6	470,9
6.	Mojokerto	337,9	322,7	272,8
7.	Nganjuk	361,6	361,0	354,2
8.	Ngawi	334,6	338,2	320,7
9.	Pacitan	277,7	295,0	286,6
10.	Pamekasan	266,9	286,6	257,8
11.	Pasuruan	387,1	400,7	384,3
12.	Ponorogo	405,7	340,7	319,3
13.	Probolinggo	282,7	337,1	311,1
14.	Sampang	279,5	297,1	249,6
15.	Sidoarjo	415,8	329,4	397,1
16.	Situbondo	303,0	285,9	276,6
17.	Sumenep	318,2	329,0	301,4
18.	Trenggalek	290,5	316,0	289,4
19.	Tuban	312,3	304,5	304,9
20.	Tulungagung	438,5	397,9	385,7
21.	Kota Blitar	104,6	85,4	79,1
22.	Kota Kediri	111,3	121,0	137,9
23.	Kota Madiun	70,7	77,8	73,3
24.	Kota Malang	184,5	190,2	164,8
25.	Kota Mojokerto	74,3	61,7	87,2
26.	Kota Pasuruan	124,4	79,7	71,6
27.	Kota Probolinggo	102,1	88,7	83,5
28.	Kota Surabaya	398,8	380,4	441,0
29.	Kota Batu	77,8	68,1	59,4
30.	Bangkalan	260,7	334,9	273,9
31.	Banyuwangi	423,7	403,6	392,1
32.	Blitar	382,0	377,6	326,9
33.	Bojonegoro	349,5	371,5	338,0
34.	Bondowoso	309,1	387,5	315,7
35.	Gresik	330,3	319,2	280,6
36.	Jember	478,4	500,3	456,7
37.	Jombang	341,1	331,1	337,6
38.	Kediri	406,6	418,3	382,4

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 (data diolah).

Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam miliar)

No.	Nama Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020
1.	Lamongan	531,8	490,4	325,4
2.	Lumajang	288,4	247,3	198,2
3.	Madiun	291,6	358,0	254,4
4.	Magetan	194,9	349,5	237,2
5.	Malang	718,4	808,7	563,8
6.	Mojokerto	554,1	544,7	302,4
7.	Nganjuk	339,8	435,3	249,6
8.	Ngawi	307,4	362,9	281,0
9.	Pacitan	271,9	372,1	140,1
10.	Pamekasan	317,3	399,6	462,9
11.	Pasuruan	448,0	447,0	352,1
12.	Ponorogo	403,3	427,1	277,8
13.	Probolinggo	242,8	357,9	254,6
14.	Sampang	312,6	361,8	295,4
15.	Sidoarjo	810,6	800,2	519,3
16.	Situbondo	398,4	354,7	237,7
17.	Sumenep	353,7	367,3	373,7
18.	Trenggalek	311,4	407,8	231,3
19.	Tuban	495,0	474,3	309,2
20.	Tulungagung	370,7	247,7	246,4
21.	Kota Blitar	160,0	247,4	114,8
22.	Kota Kediri	133,2	182,8	98,3
23.	Kota Madiun	259,1	307,9	191,1
24.	Kota Malang	351,2	238,5	363,2
25.	Kota Mojokerto	119,4	134,6	113,4
26.	Kota Pasuruan	104,3	163,2	76,1
27.	Kota Probolinggo	162,8	181,8	86,0
28.	Kota Surabaya	2430,1	2754,3	1583,7
29.	Kota Batu	125,4	143,1	94,1
30.	Bangkalan	324,7	420,9	177,1
31.	Banyuwangi	480,4	529,5	553,4
32.	Blitar	409,8	518,4	272,0
33.	Bojonegoro	601,3	1304,8	1392,8
34.	Bondowoso	284,8	385,6	227,3
35.	Gresik	369,9	538,1	281,7
36.	Jember	532,3	731,6	188,3
37.	Jombang	293,7	374,8	243,6
38.	Kediri	547,1	577,5	400,8

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 (data diolah).

Transformasi Data dalam Bentuk SQRT (Akar Kuadrat)

NO.	SQRT_X1	SQRT_X2	SQRT_X3	SQRT_X4	Y
1.	1,44	20,89	33,85	20,73	23,06
2.	1,58	16,44	31,19	17,51	16,98
3.	1,55	14,80	29,63	17,43	17,08
4.	1,52	14,03	30,00	16,70	13,96
5.	1,40	24,19	40,81	23,52	26,80
6.	1,28	23,37	31,21	18,38	23,54
7.	1,46	19,02	32,55	19,02	18,43
8.	1,52	14,96	32,24	18,29	17,53
9.	1,43	13,61	28,17	16,66	16,49
10.	1,43	14,91	29,15	16,34	17,81
11.	1,33	24,79	34,35	19,67	21,17
12.	1,50	17,00	32,31	20,14	20,08
13.	1,74	15,31	31,10	16,81	15,58
14.	1,84	11,63	28,73	16,72	17,68
15.	1,22	41,06	34,69	20,39	28,47
16.	1,43	13,69	28,40	17,41	19,96
17.	1,97	13,63	33,83	17,84	18,81
18.	1,57	15,29	29,76	17,04	17,65
19.	1,54	21,04	32,07	17,67	22,25
20.	1,52	21,29	33,94	20,94	19,25
21.	1,30	12,77	20,52	10,22	12,65
22.	1,44	15,78	24,64	10,55	11,54
23.	1,24	15,19	22,41	8,41	16,10
24.	1,34	23,60	29,06	13,58	18,74
25.	1,31	13,51	19,75	8,62	10,93
26.	1,40	12,37	20,60	11,15	13,57
27.	1,26	13,26	21,49	10,10	12,76
28.	1,15	70,52	34,81	19,97	49,30
29.	1,00	12,75	21,79	8,82	11,20
30.	1,81	14,12	31,54	16,15	18,02
31.	1,29	21,21	37,09	20,58	21,92
32.	1,55	15,89	33,31	19,55	20,24
33.	1,77	20,62	30,54	18,69	24,52
34.	1,56	14,26	30,17	17,58	16,88
35.	1,30	30,94	30,16	18,17	19,23
36.	1,58	24,44	41,20	21,87	23,07
37.	1,49	20,93	33,04	18,47	17,14
38.	1,56	21,84	35,00	20,16	23,39
39.	1,44	21,73	34,50	19,30	22,15
40.	1,70	17,22	31,77	17,65	15,73
41.	1,45	15,14	30,15	17,65	18,92
42.	1,57	15,41	30,59	16,89	18,69

43.	1,42	24,98	41,58	24,41	28,44
44.	1,30	23,56	31,73	17,96	23,34
45.	1,47	19,19	33,25	19,00	20,86
46.	1,57	15,97	32,80	18,39	19,05
47.	1,56	14,11	28,61	17,17	19,29
48.	1,61	14,82	29,87	16,93	19,99
49.	1,30	25,51	34,97	20,02	21,14
50.	1,58	17,05	32,99	18,46	20,67
51.	1,72	15,67	31,79	18,36	18,92
52.	2,38	12,99	29,50	17,24	19,02
53.	1,23	41,11	35,57	18,15	28,29
54.	1,44	14,31	28,89	16,91	18,83
55.	2,71	15,70	34,57	18,14	19,16
56.	1,56	16,89	30,27	17,78	20,19
57.	1,54	22,76	32,65	17,45	21,78
58.	1,48	22,05	34,57	19,95	15,74
59.	1,29	12,89	20,99	9,24	15,73
60.	1,43	16,33	25,33	11,00	13,52
61.	1,35	15,88	23,02	8,82	17,55
62.	1,33	24,25	29,86	13,79	15,44
63.	1,36	13,88	20,36	7,85	11,60
64.	1,40	12,72	21,16	8,93	12,77
65.	1,25	13,26	21,95	9,42	13,48
66.	1,19	73,36	36,19	19,50	52,48
67.	1,00	13,55	22,35	8,25	11,96
68.	2,55	16,19	32,30	18,30	20,52
69.	1,40	22,26	37,93	20,09	23,01
70.	1,55	16,90	34,04	19,43	22,77
71.	1,08	23,69	31,23	19,27	36,12
72.	1,49	14,78	30,80	19,69	19,64
73.	1,45	31,32	31,07	17,87	23,20
74.	1,41	25,84	42,23	22,37	27,05
75.	1,55	21,83	33,57	18,20	19,36
76.	1,57	21,40	35,74	20,45	24,03
77.	3,19	21,95	33,15	18,23	18,04
78.	3,21	17,33	30,14	16,71	14,08
79.	3,03	16,07	28,63	16,44	15,95
80.	3,02	14,26	29,13	16,47	15,40
81.	3,19	24,16	39,62	21,70	23,74
82.	2,94	23,18	30,26	16,52	17,39
83.	3,04	20,06	31,60	18,82	15,80
84.	3,03	16,43	31,32	17,91	16,76
85.	3,06	12,98	27,20	16,93	11,83
86.	3,17	15,24	28,30	16,06	21,51

87.	3,09	26,46	33,22	19,60	18,77
88.	2,90	17,42	31,50	17,87	16,67
89.	3,10	15,96	30,63	17,64	15,96
90.	2,79	13,25	28,00	15,80	17,19
91.	3,35	42,41	33,91	19,93	22,79
92.	3,14	14,79	27,45	16,63	15,42
93.	2,94	16,13	33,03	17,36	19,33
94.	3,11	16,06	28,89	17,01	15,21
95.	3,66	23,79	31,19	17,46	17,58
96.	3,26	22,60	32,86	19,64	15,70
97.	3,13	13,21	20,02	8,89	10,71
98.	3,71	16,21	24,07	11,74	9,92
99.	3,30	15,78	21,77	8,56	13,82
100.	3,13	22,16	28,37	12,84	19,06
101.	3,35	15,23	19,34	9,34	10,65
102.	3,44	12,04	20,10	8,46	8,73
103.	3,34	13,55	20,93	9,14	9,27
104.	3,52	65,50	34,69	21,00	39,80
105.	3,74	11,69	21,29	7,71	9,70
106.	3,62	15,27	30,55	16,55	13,31
107.	3,33	21,97	36,11	19,80	23,52
108.	3,13	17,39	32,50	18,08	16,49
109.	2,81	26,85	29,59	18,38	37,32
110.	2,98	14,92	29,19	17,77	15,07
111.	3,35	30,41	29,53	16,75	16,78
112.	3,24	24,36	40,15	21,37	13,72
113.	3,08	21,65	31,88	18,37	15,61
114.	3,15	22,24	34,16	19,56	20,02

Sumber : *Output* SPSS, diolah Penulis,2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	241.118.418.614,99	472.002.823.163,86	481.759.328.988,51
Dana Alokasi Umum	764.107.480.000,00	1.183.848.580.000,00	1.098.971.379.000,00
Dana Alokasi Khusus	213.400.061.414,00	370.944.126.246,00	331.551.509.218,00
Belanja Modal	167.948.154.390,00	490.432.716.464,10	325.359.777.833,41

Sumber: <https://bpkad.lamongankab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	296.467.374.174,37	300.263.112.642,77
Dana Alokasi Umum	-	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00
Belanja Modal	-	247.326.031.850,58	198.145.592.481,26

Sumber: <https://ppdi.lumajangkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	219.041.431.266,71	229.206.394.170,00	258.211.505.535,08
Dana Alokasi Umum	877.862.289.244,00	904.957.172.000,00	819.494.603.000,00
Dana Alokasi Khusus	303.837.979.055,00	311.563.437.089,00	268.108.993.558,00
Belanja Modal	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67	254.429.829.266,14

Sumber: <https://madiunkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	196.826.063.935,96	237.377.706.041,60	203.465.853.559,25
Dana Alokasi Umum	899.960.340.000,00	935.465.173.000,00	848.821.655.000,00
Dana Alokasi Khusus	278.740.644.408,00	285.333.838.824,00	269.443.595.171,00
Belanja Modal	194.944.111.688,41	349.500.872.689,75	237.214.475.379,53

Sumber: <https://ppdi.magetankab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	585.290.988.835,99	623.808.877.784,41	583.846.309.201,31
Dana Alokasi Umum	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.570.043.946.000,00
Dana Alokasi Khusus	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00	468.503.698.433,00
Belanja Modal	718.608.045.403,02	808.653.391.279,23	563.771.007.581,01

Sumber: <https://malangkab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	-	402.347.144.361,43
Dana Alokasi Umum	-	-	998.778.363.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	-	350.474.099,120,00
Belanja Modal	-	-	249.630.540.424,49

Sumber: <https://ngawikab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	185.153.427.758,47	199.044.387.517,51	168.459.638.378,38
Dana Alokasi Umum	793.715.346.000,00	817.563.878.000,00	739.879.366.000,00
Dana Alokasi Khusus	277.683.212.331,00	146.448.588.890,00	283.563.426.881,00
Belanja Modal	271.920.244.653,80	372.064.48.883,52	140.058.487.669,00

Sumber: <https://pacitankab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	76.006.830.369,85	68.960.643.295,68	56.338.637.007,57
Dana Alokasi Umum	849.764.469.000,00	892.340.709.000,00	800.743.381.000,00
Dana Alokasi Khusus	266.900.962.262,00	286.260.072.006,00	257.376.270.637,00
Belanja Modal	7.601.274.000,00	11.332.296.300,00	5.105.053.500,00

Sumber: <https://keuanganpamekasan.com>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	-	700.111.491.641,40
Dana Alokasi Umum	-	-	1.103.249.454.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	-	380.529.035.974,00
Belanja Modal	-	-	352.127.050.135,28

Sumber: <https://pasuruankab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	289.017.741.958,47	290.815.307.168,20	303.331.015.448,27
Dana Alokasi Umum	1.038.913.988.811,00	1.088.150.278.000,00	992.269.673.000,00
Dana Alokasi Khusus	405.686.933.708,00	340.671.570.344,00	318.666.710.776,00
Belanja Modal	403.302.695.098,47	427.143.914.658,21	277.825.993.167,00

Sumber: <https://ppdi.ponorogo.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	135.349.867.961,19	-	175.518.944.949,09
Dana Alokasi Umum	825.443.163.000,00	-	784.115.868.000,00
Dana Alokasi Khusus	279.475.126.533,00	-	247.139.609.783,00
Belanja Modal	312.562.644.306,00	-	295.428.275.565,00

Sumber: <https://sampangkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	1.689.953.213.262,69	1.798.515.746.931,15
Dana Alokasi Umum	-	1.265.114.331.000,00	1.149.801.473.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	328.938.397.340,00	388.072.820.945,00
Belanja Modal	-	800.179.139.421,56	519.252.871.399,47

Sumber: <https://sidoarjob.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	442.531.646.743,74	518.003.562.562,97	566.077.757.668,16
Dana Alokasi Umum	1.027.874.285.222,00	1.066.052.324.000,00	972.894.861.000,00
Dana Alokasi Khusus	311.052.055.461,00	304.479.064.674,00	303.012.010.170,00
Belanja Modal	494.963.683.321,90	474.256.825.168,00	309.230.413.251,33

Sumber: <https://tubankab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	-	42.455.039.428,34
Dana Alokasi Umum	-	-	1.087.050.427.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	-	390.869.109.498,00
Belanja Modal	-	-	320.421.442.281,39

Sumber: <https://bpkad.tulungagungkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Blitar
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	163.026.005.752,93	166.140.178.781,39	174.590.638.444,23
Dana Alokasi Umum	421.212.306.000,00	437.776.459.000,00	400.918.516.000,00
Dana Alokasi Khusus	104.546.300.626,00	85.378.449.273,00	77.921.304.507,00
Belanja Modal	160.034.400.213,66	247.385.889.913,27	114.808.593.714,45

Sumber: <https://ppdi.blitarkota.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kediri
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	225.912.159.759,17	266.745.042.377,64	262.886.289.227,78
Dana Alokasi Umum	606.928.225.000,00	637.453.134.000,00	579.131.566.000,00
Dana Alokasi Khusus	62.230.922.000,00	120.773.716.576,00	137.021.477.201,00
Belanja Modal	133.582.806.235,00	182.759.961.093,26	98.314.709.094,90

Sumber: <https://ppdi.kedirikota.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	252.048.754.413,59	248.944.404.487,59
Dana Alokasi Umum	-	522.596.204.000,00	473.852.439.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00
Belanja Modal	-	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57

Sumber: <https://madiunkota.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Surabaya Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	4.973.031.004.727,10	5.381.920.253.809,67	4.289.960.292.372,98
Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000,00	1.254.344.402.000,00	1.203.461.956.000,00
Dana Alokasi Khusus	398.797.386.102,00	380.383.564.271,00	420.040.961.516,00
Belanja Modal	2.430.061.039.309,45	2.754.304.824.082,00	1.583.663.159.605,00

Sumber: <https://surabaya.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	450.066.949.215,18	-	275.412.492.112,64
Dana Alokasi Umum	1.375.784.247.000,00	-	1.964.104.674.615,00
Dana Alokasi Khusus	423.717.990.705,00	-	
Belanja Modal	480.382.663.298,36	-	514.870.089.091,62

Sumber: <https://banyuwangikab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	252.453.245.801,27	285.742.715.698,86	302.540.062.676,13
Dana Alokasi Umum	1.109.812.753.000,00	1.153.914.324.000,00	1.056.024.896.000,00
Dana Alokasi Khusus	382.043.194.822,00	374.989.099.138,00	324.410.409.191,00
Belanja Modal	409.773.750.053,41	518.398.600.299,86	271.999.153.804,09

Sumber: <https://transparansi.blitarkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	-	843.284.521.811,63
Dana Alokasi Umum	-	-	986.465.055.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	-	393.326.246.772,00
Belanja Modal	-	-	2.418.342.931.136,52

Sumber: <https://bpkad.bojonegorokab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	957.255.706.268,71	980.776.381.995,43	924.657.913.563,07
Dana Alokasi Umum	909.888.092.000,00	958.325.036.000,00	871.987.860.000,00
Dana Alokasi Khusus	330.283.398.649,00	318.722.976.334,00	274.738.980.199,00
Belanja Modal	369.883.330.557,33	538.046.525.562,34	281.697.688.881,65

Sumber: <https://gresikkab.go.id>

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	667.598.426.909,96	593.175.154.485,65
Dana Alokasi Umum	-	1.765.927.493.000,00	1.611.693.896.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	481.969.260.447,00	458.455.115.171,00
Belanja Modal	-	731.597.027.829,73	188.310.951.430,71

Sumber: <https://ppdi.jemberkab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	402.072.289.955,00	476.662.933.476,00	468.627.918.703,89
Dana Alokasi Umum	1.091.779.457.000,00	1.126.979.294.000,00	1.016.614.394.000,00
Dana Alokasi Khusus	364.091.783.000,00	329.996.636.026,00	334.946.162.762,00
Belanja Modal	270.239.638.920,91	374.814.005.379,55	243.636.238.818,00

Sumber: <https://jombangkab.go.id>.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	476.905.398.475,62	-	-
Dana Alokasi Umum	1.225.331.641.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	406.576.707.166,00	-	-
Belanja Modal	547.123.553.524,19	-	-

Sumber: <https://ppdi.kedirikab.go.id>.

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	474.788.909.899,00	501.070.335.477,00	542.338.009.277
Dana Alokasi Umum	973.768.511.000,00	1.001.947.249.000,00	1.018.103.257.000,00
Dana Alokasi Khusus	369.033.600.000,00	364.858.910.000,00	338.547.374.000,00
Belanja Modal	448.222.074.006,00	511.077.803.353,00	364.684.176.904,70

Sumber: <https://mojokertokab.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	342.768.492.189,00	376.112.280.057,00
Dana Alokasi Umum	-	1.102.764.455.000,00	1.120.545.177.000,00
Dana Alokasi Khusus	-	233.384.855.000,00	274.762.393.000,00
Belanja Modal	-	293.471.383.592,00	260.906.987.352,66

Sumber: <https://nganjukkab.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	221.296.639.290,00	254.491.135.184,00	266.795.031.578,00
Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.183.078.444.000,00	1.213.090.268.000,00
Dana Alokasi Khusus	330.554.920.000,00	358.697.406.234,00	322.648.637.000,00
Belanja Modal	309.511.716.236,00	447.315.680.272,59	374.773.190.730,00

Sumber: <https://sumenepkab.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Tregalek Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	220.244.865.465,47	299.160.127.721,35	302.583.246.200,00
Dana Alokasi Umum	885.545.437.000,00	912.478.590.000,00	928.446.854.000,00
Dana Alokasi Khusus	306.254.458.000,00	350.188.316.000,00	328.409.411.000,00
Belanja Modal	360.051.061.698,96	520.610.136.486,41	319.105.021.927,00

Sumber: <https://tregalekkab.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	182.508.304.195,27	192.695.566.219,26	231.875.337.605,94
Dana Alokasi Umum	378.916.109.000,00	414.394.006.000,00	373.898.704.000,00
Dana Alokasi Khusus	74.274.872.665,00	61.400.515.537,00	86.715.882.025,00
Belanja Modal	119.434.272.446,86	134.616.621.172,42	113.437.780.600,21

Sumber: <https://ppdi.mojokertokota.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	-	143.936.741.210,84	-
Dana Alokasi Umum	-	446.869.099.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	-	90.076.393.006,00	-
Belanja Modal	-	252.252.695.161,00	-

Sumber: <https://pasuruankab.go.id>

**Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018-2020**

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	186.418.196.551,77	193.325.576.023,77	-
Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	940.848.730.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00	423.737.691.000,00	-
Belanja Modal	219.665.825.714,00	311.380.217.812,04	-

Sumber: <https://bondowosokab.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	3.705.473.950.844,35	3.813.127.410.434,31	(107.653.459.589,96)	102,91
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	509.999.102.162,35	583.846.309.201,31	(73.847.207.038,96)	114,48
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	213.528.000.000,00	280.725.934.638,67	(67.197.934.638,67)	131,47
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.260.366.927,00	23.195.929.714,00	(935.562.787,00)	104,20
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.445.436.424,07	20.423.890.327,70	21.546.096,37	99,89
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.765.298.811,28	259.500.554.520,94	(5.735.255.709,66)	102,26
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.249.739.180.814,00	2.205.934.268.183,00	43.804.912.631,00	98,05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	182.901.444.814,00	167.386.623.750,00	15.514.821.064,00	91,52
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.592.832.074.000,00	1.570.043.946.000,00	22.788.128.000,00	98,57
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	474.005.662.000,00	468.503.698.433,00	5.501.963.567,00	98,84
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	945.735.667.868,00	1.023.346.833.050,00	(77.611.165.182,00)	108,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	267.113.900.000,00	286.102.672.694,00	(18.988.772.694,00)	107,11
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	184.493.271.618,00	243.115.671.694,00	(58.622.400.076,00)	131,77
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.076.215.000,00	85.076.215.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29.655.651.250,00	29.655.651.250,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	379.396.630.000,00	379.396.622.412,00	7.588,00	100,00
2	BELANJA	4.145.907.996.483,42	3.904.352.977.902,03	241.555.018.581,39	94,17
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.314.511.660.583,81	2.197.943.600.778,30	116.568.059.805,51	94,96
2.1.1	Belanja Pegawai	1.283.047.781.202,89	1.203.060.797.015,88	79.986.984.187,01	93,77
2.1.4	Belanja Hibah	204.378.838.800,00	196.905.206.000,00	7.473.632.800,00	96,34
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.681.400.000,00	46.346.570.000,00	1.334.830.000,00	97,20
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.538.296.388,00	16.921.821.574,50	616.474.813,50	96,48
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	574.653.497.600,00	574.653.490.012,00	7.588,00	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	187.211.846.592,92	160.055.716.175,92	27.156.130.417,00	85,49
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.831.396.335.899,61	1.706.409.377.123,73	124.986.958.775,88	93,18
2.2.1	Belanja Pegawai	299.539.379.283,56	296.464.671.603,95	3.074.707.679,61	98,97
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	952.365.848.062,88	846.173.697.938,77	106.192.150.124,11	88,85

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2 . 2 . 3	Belanja Modal	579.491.108.553,17	563.771.007.581,01	15.720.100.972,16	97,29
	SURPLUS / (DEFISIT)	(440.434.045.639,07)	(91.225.567.467,72)	(349.208.478.171,35)	20,71
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	458.434.045.639,07	465.245.559.455,42	(6.811.513.816,35)	101,49
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	408.434.045.639,07	408.359.685.639,07	74.360.000,00	99,98
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	56.885.873.816,35	(6.885.873.816,35)	113,77
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	100,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	100,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	440.434.045.639,07	447.245.559.455,42	(6.811.513.816,35)	101,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	356.019.991.987,70	(356.019.991.987,70)	0,00

Malang, 1 January 2020

BUPATI MALANG,

SANUSI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	7.5.1.1	1.757.160.473.076,52	1.842.457.400.838,08	104,85	1.947.016.775.096,37
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.5.1.1.1	215.747.202.320,52	258.211.505.535,08	119,68	229.206.394.170,37
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	53.827.350.000,00	69.642.788.090,22	129,38	68.639.241.664,04
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	7.416.428.420,00	8.759.612.040,00	118,11	9.725.917.059,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	7.411.887.452,00	7.537.159.212,28	101,69	6.290.894.932,17
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	147.091.536.448,52	172.271.946.192,58	117,12	144.550.340.515,16
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2	1.467.996.317.889,00	1.518.370.856.713,00	103,43	1.659.023.813.099,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	7.5.1.1.2.1	1.144.528.032.709,00	1.174.980.529.263,00	102,66	1.305.223.591.072,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA		41.327.217.328,00	41.610.577.301,00	100,69	29.672.441.782,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		20.912.626.000,00	45.766.355.404,00	218,85	59.030.540.202,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		826.600.103.000,00	819.494.603.000,00	99,14	904.957.172.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		74.071.021.000,00	69.958.373.111,00	94,45	128.763.176.482,00
4.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik - LRA		181.617.065.381,00	198.150.620.447,00	109,10	182.800.260.606,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	7.5.1.1.2.2	224.788.616.000,00	224.788.616.000,00	100,00	208.501.962.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA		224.788.616.000,00	224.788.616.000,00	100,00	208.501.962.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	7.5.1.1.2.3	79.304.716.180,00	99.239.758.450,00	125,14	140.759.651.027,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		79.304.716.180,00	99.239.758.450,00	125,14	140.759.651.027,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	7.5.1.1.2.4	19.374.953.000,00	19.361.953.000,00	99,93	4.538.609.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		19.374.953.000,00	19.361.953.000,00	99,93	4.538.609.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3	73.416.952.867,00	65.875.038.590,00	89,73	58.786.567.827,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1.3.1	73.416.952.867,00	65.875.038.590,00	89,73	58.678.762.774,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	107.805.053,00
5	BELANJA	7.5.1.2	1.529.784.265.060,58	1.408.802.988.039,94	92,09	1.527.709.787.524,57
5.1	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1	1.213.466.855.882,25	1.136.729.845.289,80	93,68	1.168.314.205.370,90
5.1.1	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	743.834.842.420,94	715.160.168.516,00	96,15	702.639.387.723,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	415.823.033.821,31	374.546.617.144,80	90,07	415.424.491.501,90
5.1.4	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.3	515.000.000,00	291.847.000,00	56,67	475.315.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	40.078.335.090,00	35.642.112.629,00	88,93	37.887.072.396,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	13.215.644.550,00	11.089.100.000,00	83,91	11.887.938.750,00
5.2	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2	284.817.409.178,33	254.429.829.266,14	89,33	357.952.659.653,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	7.765.087.655,91	6.560.084.000,00	84,48	6.311.184.000,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	103.051.727.579,00	82.054.730.567,96	79,62	70.058.452.835,92
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	47.528.354.399,70	44.804.351.907,34	94,27	131.372.263.208,31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	119.784.258.228,72	114.852.625.739,84	95,88	125.706.448.091,92
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	5.369.106.536,00	4.928.796.151,00	91,80	20.947.178.015,00
5.2.6	Belanja Modal- Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.318.874.779,00	1.229.240.900,00	93,20	3.557.133.502,52
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.3	31.500.000.000,00	17.643.313.484,00	56,01	1.442.922.500,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		31.500.000.000,00	17.643.313.484,00	56,01	1.442.922.500,00
6	TRANSFER	7.5.1.3	388.715.588.676,00	387.754.962.296,97	99,75	420.601.703.603,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.1.3.1	4.217.267.000,00	3.798.521.700,00	90,07	5.821.721.600,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.3.1.1	2.194.177.000,00	2.194.177.000,00	100,00	4.880.423.600,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.3.1.2	2.023.090.000,00	1.604.344.700,00	79,30	0,00
6.1.3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	941.298.000,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.3.2	384.498.321.676,00	383.956.440.596,97	99,86	414.779.982.003,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.3.2.1	383.438.719.000,00	382.896.837.920,97	99,86	413.752.074.555,32
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3.2.2	1.059.602.676,00	1.059.602.676,00	100,00	1.027.907.447,68
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.4	(161.339.380.660,06)	45.899.450.501,17	(28,45)	(1.294.716.031,20)
7	PEMBIAYAAN	7.5.1.5				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.5.1	165.839.380.660,06	165.739.380.660,06	99,94	172.034.096.691,26
7.1.1	Penggunaan SILPA	7.5.1.5.1.1	165.739.380.660,06	165.739.380.660,06	100,00	172.032.096.691,26
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.1.5.1.2	100.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.5.2	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.5.2.1	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		161.339.380.660,06	161.239.380.660,06	99,94	167.034.096.691,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.6	0,00	207.138.831.161,23	0,00	165.739.380.660,06

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan



BUPATI MADIUN,

ATMADAWAMI RAGIL SAPUTRO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN				
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106,86	296.467.374.174,37
111	Pendapatan Pajak Daerah	70.000.000.000,00	68.659.995.181,00	98,09	74.232.832.052,00
112	Pendapatan Retribusi Daerah	50.019.898.222,00	46.060.581.317,00	92,08	58.197.444.588,18
113	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.105.516.366,26	5.105.516.366,26	100,00	4.968.766.089,07
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.852.529.952,60	180.437.019.778,51	115,77	159.068.331.445,12
12	PENDAPATAN TRANSFER	1.723.648.930.650,00	1.725.518.141.013,00	100,11	1.774.505.135.577,00
121	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.292.726.757.634,00	1.271.212.220.474,00	98,34	1.409.112.910.571,00
1211	Dana Bagi Hasil Pajak	31.886.741.114,00	23.800.062.748,00	74,64	17.345.158.115,00
1212	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	40.836.663.648,00	44.540.332.432,00	109,07	59.160.410.819,00
1213	Dana Alokasi Cukai	23.511.443.753,00	21.676.888.481,00	92,20	18.765.467.031,00
1214	Dana Alokasi Umum	920.012.364.000,00	908.166.706.000,00	98,71	1.003.092.909.000,00
1215	Dana Alokasi khusus	276.479.545.119,00	273.028.230.813,00	98,75	310.748.965.606,00
122	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	227.364.377.000,00	227.364.377.000,00	100,00	188.469.078.400,00
1221	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1222	Dana Penyesuaian	227.364.377.000,00	227.364.377.000,00	100,00	188.469.078.400,00
123	Transfer Pemerintah Provinsi	203.557.796.016,00	226.941.543.539,00	111,49	176.923.146.606,00
1231	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.928.704.266,00	123.312.451.789,00	123,40	143.138.787.606,00
1232	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	103.629.091.750,00	103.629.091.750,00	100,00	33.784.359.000,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	99.673.710.379,00	93.068.317.985,37	93,37	115.621.305.341,92
131	Pendapatan Hibah	99.546.803.000,00	90.502.574.768,00	90,91	115.280.781.160,00
132	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
133	Pendapatan Lainnya	126.907.379,00	2.565.743.217,37	-	340.524.181,92
	JUMLAH PENDAPATAN	2.104.300.585.569,86	2.118.849.571.641,14	100,69	2.186.593.815.093,29
2	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI	1.609.722.747.991,16	1.480.355.378.952,79	91,96	1.594.976.224.192,43
211	Belanja Pegawai	790.148.100.431,21	741.631.927.441,00	93,86	780.427.298.106,50
212	Belanja Barang dan Jasa	628.632.611.691,95	555.859.126.089,79	88,42	599.495.571.358,03
213	Belanja Bunga	-	-	-	-
214	Belanja Subsidi	-	-	-	-
215	Belanja Hibah	127.793.251.752,00	125.225.839.973,00	97,99	159.157.268.656,90
216	Belanja Bantuan Sosial	62.078.956.767,00	56.568.658.101,00	91,12	54.895.923.459,00
217	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1.069.827.349,00	1.069.827.348,00	100,00	1.000.162.612,00
22	BELANJA MODAL	215.354.341.154,31	198.145.592.481,26	92,01	247.326.031.850,58
221	Belanja Tanah	766.852.900,00	747.987.360,00	97,54	8.308.200,00
222	Belanja Peralatan dan Mesin	69.926.729.040,00	61.177.461.037,90	87,49	73.189.412.867,28
223	Belanja Gedung dan Bangunan	25.995.497.778,43	23.973.023.775,62	92,22	50.042.478.059,87
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.919.970.137,00	101.925.745.491,74	95,33	104.177.050.289,43
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.483.862.450,00	6.346.598.272,00	97,88	12.170.465.133,00
226	Belanja Aset Lainnya	5.261.428.848,88	3.974.776.544,00	75,55	7.738.317.301,00
23	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.447.496.044,00	18.033.773.257,00	52,35	1.608.071.300,00
231	Belanja Tidak Terduga	34.447.496.044,00	18.033.773.257,00	52,35	1.608.071.300,00
	JUMLAH BELANJA	1.859.524.585.189,47	1.696.534.744.691,05	91,23	1.843.910.327.343,01
24	TRANSFER				
241	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	332.255.537.916,00	332.198.037.916,00	99,98	385.316.941.697,00
2411	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	5.053.955.636,00
2412	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	2.044.566.445,00
2413	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	332.255.537.916,00	332.198.037.916,00	99,98	378.218.419.616,00
	JUMLAH TRANSFER	332.255.537.916,00	332.198.037.916,00	99,98	385.316.941.697,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.191.780.123.105,47	2.028.732.782.607,05	92,56	2.229.227.269.040,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.479.537.535,61)	90.116.789.034,09	(103,01)	(42.633.453.946,72)

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2018 dan 2017**

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp) (Audited)	%	REALISASI 2017 (Rp) Audited
PENDAPATAN DAERAH	1.713.487.271.710,06	1.697.685.706.523,24	99,08	1.605.112.287.120,58
Pendapatan Asli Daerah				
Hasil Pajak Daerah	23.945.000.000,00	21.997.977.280,13	91,87	20.557.363.424,63
Hasil Retribusi Daerah	15.133.660.550,00	12.420.511.362,00	82,08	10.917.030.412,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.563.703.939,00	6.378.024.135,02	97,17	6.251.369.919,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.775.037.660,26	94.553.355.184,04	101,92	171.819.460.921,55
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	138.417.402.149,26	135.349.867.961,19	97,78	209.545.224.677,58
Pendapatan Transfer	1.508.106.669.560,80	1.495.975.453.445,00	99,20	1.378.553.546.011,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.559.833.240,00	39.733.197.973,00	89,17	38.471.558.876,00
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	61.833.210.178,00	67.465.013.364,00	109,11	16.587.752.047,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	825.443.163.000,00	825.443.163.000,00	100,00	818.929.326.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	294.215.735.000,00	279.475.126.533,00	94,99	230.240.011.224,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.226.051.941.418,00	1.212.116.500.870,00	98,86	1.104.228.648.147,00
Transfer Pemerintah Pusat-lainnya				
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	179.206.635.000,00	179.206.635.000,00	100,00	167.492.597.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	179.206.635.000,00	179.206.635.000,00	100,00	167.492.597.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.235.993.142,80	89.040.217.575,00	102,07	95.739.000.864,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	15.612.100.000,00	15.612.100.000,00	100,00	11.093.300.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	102.848.093.142,80	104.652.317.575,00	101,75	106.832.300.864,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Pendapatan Hibah	66.963.200.000,00	66.360.385.117,05	99,10	17.013.516.432,00
Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.963.200.000,00	66.360.385.117,05	99,10	17.013.516.432,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.713.487.271.710,06	1.697.685.706.523,24	99,08	1.605.112.287.120,58

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp) (Audited)	%	REALISASI 2017 (Rp) Audited
BELANJA DAERAH	1.562.945.117.559,49	1.418.768.457.564,17	90,78	1.387.214.924.928,16
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	662.048.501.780,49	614.981.858.037,00	92,89	604.212.852.216,92
Belanja Barang dan Jasa	401.203.289.108,72	342.922.672.688,17	85,47	312.271.538.018,78
Belanja Hibah	141.313.793.631,00	134.670.026.589,00	95,30	80.586.997.484,00
Belanja Bantuan Sosial	16.243.744.000,00	13.575.918.144,00	83,58	15.045.212.059,00
Jumlah Belanja Operasi	1.220.809.328.520,21	1.106.150.475.458,17	90,61	1.012.116.599.778,70
Belanja Modal				
Tanah	19.092.345.000,00	8.173.142.300,00	42,81	15.160.861.323,00
Peralatan dan Mesin	45.271.003.358,35	38.549.747.778,00	85,15	47.174.707.193,59
Gedung dan Bangunan	65.825.396.193,93	61.627.469.281,00	93,62	82.815.729.154,03
Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.006.301.487,00	195.146.888.208,00	96,60	229.483.575.427,39
Aset Tetap Lainnya	9.371.760.000,00	9.065.396.739,00	96,73	240.897.051,45
Jumlah Belanja Modal	341.566.806.039,28	312.562.644.306,00	91,51	374.875.770.149,46
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Tidak Terduga	568.983.000,00	55.337.800,00	9,73	222.555.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	568.983.000,00	55.337.800,00	9,73	222.555.000,00
Transfer				
Transfer Bagi Hasil ke Desa	2.068.801.715,00			2.275.053.174,00
Bagi Hasil Pajak	1.388.150.000,00	0,00	0,00	1.230.839.835,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	680.651.715,00	0,00	0,00	1.044.213.339,00
Transfer Bantuan Keuangan	269.641.919.000,00	269.458.666.947,00	99,93	274.456.553.050,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	268.270.635.000,00	268.153.137.250,00	99,96	273.151.023.353,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.371.284.000,00	1.305.529.697,00	95,20	1.305.529.697,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	271.710.720.715,00	269.458.666.947,00	99,17	276.731.606.224,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.834.655.838.274,49	1.688.227.124.511,17	92,02	1.663.946.531.152,16
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)	(121.168.566.564,43)	9.458.582.012,07	(7,81)	(58.834.244.031,58)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Daerah				
Penggunaan (SILPA)	88.598.009.877,52	86.345.697.616,69	97,46	157.276.720.509,10
Pencairan Dana Cadangan	30.726.090.086,91	33.861.820.526,91	110,21	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	1.844.466.600,00	1.086.170.881,00	58,89	2.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Daerah	121.168.566.564,43	121.293.689.024,60	100,10	159.276.720.509,10

URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp) (Audited)	%	REALISASI 2017 (Rp) Audited
Pengeluaran Daerah				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	14.096.778.860,83
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Daerah	0,00	0,00	0,00	14.096.778.860,83
PEMBIAYAAN NETO	121.168.566.564,43	121.293.689.024,60	100,10	145.179.941.648,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	130.752.271.036,67		86.345.697.616,69

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Utama Ini



BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	TAHUN 2020 AUDITED	%	TAHUN 2019
PENDAPATAN	2.426.665.135.407,01	2.578.839.055.752,70	106,27	2.650.229.496.675,590
PENDAPATAN ASLI DAERAH	487.123.878.139,01	566.077.757.668,16	116,21	518.003.562.562,470
Pendapatan Pajak Daerah	251.030.317.082,00	306.909.482.317,00	122,26	236.424.785.507,310
Pendapatan Retribusi Daerah	29.053.931.984,00	31.534.164.145,00	108,54	37.141.164.524,000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.812.410.123,09	14.812.410.122,89	100,00	11.857.711.437,730
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.227.218.949,92	212.821.701.083,27	110,71	232.579.901.093,430
PENDAPATAN TRANSFER	1.847.455.257.268,00	1.918.625.184.979,00	103,85	2.036.412.128.195,000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.387.639.360.334,00	1.409.012.104.780,00	101,54	1.529.633.733.214,000
Dana Bagi Hasil Pajak	89.160.944.073,00	96.965.661.714,00	108,75	77.598.456.058,000
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	23.142.573.454,00	36.139.571.896,00	156,16	81.502.888.482,000
Dana Alokasi Umum	982.179.381.000,00	972.894.861.000,00	99,05	1.066.053.324.000,000
Dana Alokasi Khusus	293.156.461.807,00	303.012.010.170,00	103,36	304.479.064.674,000
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	365.885.070.000,00	365.885.070.000,00	100,00	289.284.956.000,000
Dana Penyesuaian	365.885.070.000,00	365.885.070.000,00	100,00	289.284.956.000,000
Transfer Pemerintah Provinsi	93.930.826.934,00	143.728.010.199,00	153,01	217.493.438.981,000
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.653.897.934,00	135.601.081.199,00	158,31	183.969.331.981,000
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	8.276.929.000,00	8.126.929.000,00	98,19	33.524.107.000,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23	95.813.805.918,120
Pendapatan Hibah	92.086.000.000,00	94.136.113.105,54	102,23	95.813.805.918,120
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
BELANJA	2.830.174.665.860,00	2.463.774.147.704,72	87,05	2.554.654.244.377,200
BELANJA OPERASI	1.911.482.607.346,58	1.685.699.268.992,41	88,19	1.652.045.062.374,490
Belanja Pegawai	1.063.757.972.713,31	982.063.509.956,68	92,32	986.006.778.840,800
Belanja Barang	621.210.133.014,62	485.115.060.553,49	78,09	511.029.954.582,490
Belanja Hibah	202.607.928.618,65	197.235.767.357,24	97,35	129.643.155.151,200
Belanja Bantuan Sosial	23.906.573.000,00	21.284.931.125,00	89,03	25.365.173.800,000
BELANJA MODAL	377.267.320.964,52	309.230.413.251,33	81,97	474.259.825.167,997
Belanja Tanah	39.904.105.326,15	10.042.421.905,00	25,17	23.795.278.644,690
Belanja Peralatan dan Mesin	95.753.277.925,39	84.921.205.760,46	88,69	119.556.197.000,110
Belanja Bangunan dan Gedung	65.757.220.970,61	58.674.411.007,11	89,23	76.045.292.738,312
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.170.454.242,02	147.673.471.595,32	89,41	237.587.763.837,604
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.913.157.500,35	7.155.083.583,44	72,18	16.588.929.110,280
Belanja Aset Lainnya	769.105.000,00	763.819.400,00	99,31	686.363.837,000
BELANJA TAK TERDUGA	124.876.958.342,30	53.560.485.652,00	42,89	1.191.862.851,050
Belanja Tak Terduga	124.876.958.342,30	53.560.485.652,00	42,89	1.191.862.851,050
TRANSFER	416.547.779.206,60	415.283.979.808,98	99,70	427.157.493.983,660
Transfer Bagi Hasil	29.064.377.606,60	28.319.875.969,98	97,44	25.220.423.533,660
Bagi Hasil Pajak	25.103.031.708,20	25.101.942.340,41	100,00	20.584.441.281,220
Bagi Hasil Retribusi	3.961.345.898,40	3.217.933.629,57	81,23	4.635.982.252,440
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	-	-	-
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	386.483.315.600,00	385.964.017.839,00	99,87	400.948.501.450,000
Belanja Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	1.000.086.000,00	1.000.086.000,00	100,00	988.569.000,000
SURPLUS / (DEFISIT)	(403.509.530.452,99)	115.064.908.047,98	(28,52)	95.575.252.298,393

URAIAN	ANGGARAN 2020	TAHUN 2020 AUDITED	%	TAHUN 2019
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	403.509.530.452,99	407.345.726.272,99	100,95	311.895.225.613,200
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	403.313.892.772,99	403.313.892.772,99	100,00	311.565.281.197,400
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		3.950.000.000,00	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	195.637.680,00	81.833.500,00	41,83	329.944.415,800
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	4.156.585.138,600
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	4.156.585.138,600
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	403.509.530.452,99	407.345.726.272,99	100,95	307.738.640.474,600
	-	522.410.634.320,97	-	403.313.892.772,993

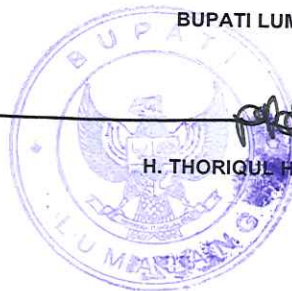


 BUPATI TUBAN
 ADITYA HALINDRA FARIDZKY

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
3	PEMBIAYAAN				
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
311	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	88.210.955.635,61	88.217.717.326,24	100,01	141.024.677.582,33
312	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
313	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
314	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
315	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	268.581.900,00	324.772.900,00	120,92	520.232.000,00
316	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
317	Dana Talangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.479.537.535,61	88.542.490.226,24	100,07	141.544.909.582,33
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
321	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
322	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	-	-	8.599.000.000,00
323	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
324	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	2.101.500.000,00
325	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	-	-	10.700.500.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	87.479.537.535,61	88.542.490.226,24	101,22	130.844.409.582,33
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	178.659.279.260,33	-	88.210.955.635,61

Lumajang, Mei 2021

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

URAIAN	REFF	ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
PENDAPATAN	-				
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.1; 1.1.1	31.277.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10	36.075.038.102,63
Pendapatan Retribusi Daerah	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.1; 1.1.2	20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62	28.851.343.904,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.1; 1.1.2	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68	2.593.777.560,31
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.1; 1.1.2	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78	199.044.387.517,51
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.1; 1)	40.544.653.647,00	37.256.152.066,00	91,89	26.165.605.233,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.1; 2)	41.132.760.795,00	45.370.175.403,00	110,30	55.631.283.804,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.1; 3)	748.480.938.000,00	739.879.366.000,00	98,85	817.563.878.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.1; 4)	295.010.511.548,00	283.563.426.881,00	96,12	146.448.588.890,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.125.168.863.990,00	1.106.069.120.350,00	98,30	1.045.809.355.927,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.2	202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00	327.787.989.440,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		202.349.929.000,00	202.349.929.000,00	100,00	327.787.989.440,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.3	65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114,08	90.982.239.491,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		65.944.274.662,00	75.229.252.061,00	114,08	90.982.239.491,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.2; 1.2.4	13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00	5.168.079.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		13.968.849.000,00	13.968.849.000,00	100,00	5.168.079.000,00
Total Pendapatan Transfer		1.407.431.916.652,00	1.397.617.150.411,00	99,30	1.469.747.663.858,00

URAIAN	REFF	ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	BABV;5.1; 5.1.1;1;1.3; 1.3.1	57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55	50.089.880.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		57.662.240.000,00	58.554.240.000,00	101,55	50.089.880.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.618.552.237.782,20	1.624.631.028.789,38	100,38	1.718.881.931.375,51
BELANJA	-				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.1;2.1.1	652.155.831.118,30	636.133.907.404,00	97,54	663.684.837.971,00
Belanja Barang	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.1;2.1.2	371.048.465.969,02	337.205.696.775,89	90,88	377.705.610.356,80
Hibah	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.1;2.1.3	98.687.874.355,00	87.702.988.960,00	88,87	52.272.194.500,00
Bantuan Sosial	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.1;2.1.4	11.199.100.000,00	10.749.680.534,00	95,99	119.702.257.569,00
Jumlah Belanja Operasi		1.133.091.271.442,32	1.071.792.273.673,89	94,59	1.213.364.900.396,80
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.2;2.2.1	1.591.045.975,00	934.954.200,00	58,76	7.403.905.650,00
Belanja Peralatan dan Mesin	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.2;2.2.2	49.739.673.436,11	43.200.008.270,00	86,85	41.939.694.568,00
Belanja Gedung dan Bangunan	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.2;2.2.3	59.898.489.120,00	56.266.451.465,00	93,94	112.242.189.820,52
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.2;2.2.4	38.047.370.062,00	33.804.571.317,00	88,85	191.062.012.582,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.2;2.2.5	5.946.667.874,00	5.852.502.417,00	98,42	19.416.682.263,00
Jumlah Belanja Modal		155.223.246.467,11	140.058.487.669,00	90,23	372.064.484.883,52
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	BABV;5.1; 5.1.1;2;2.3	39.939.731.923,95	28.900.614.243,00	72,36	2.951.907.599,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		39.939.731.923,95	28.900.614.243,00	72,36	2.951.907.599,00
JUMLAH BELANJA		1.328.254.249.833,38	1.240.751.375.585,89	93,41	1.588.381.292.879,32
TRANSFER	-				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA DAN BANTUAN KEUANGAN					
Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.1;3;3.1;	3.812.519.203,00	3.610.057.615,00	94,69	3.591.658.857,00
Bagi Hasil Retribusi	BABV;5.1; 5.1.1;3;3.2	2.141.067.801,00	1.558.006.960,00	72,77	1.928.825.286,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
Bantuan Keuangan	BABV;5.1; 5.1.1;3;3.3	324.968.550.299,56	324.351.550.299,56	99,81	327.312.348.544,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa dan bantuan Keuangan		330.922.137.303,56	329.519.614.874,56	99,58	332.832.832.687,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.659.176.387.136,94	1.570.270.990.460,45	94,64	1.921.214.125.566,32
SURPLUS/DEFISIT	BABV;5.1; 5.1.1;4;	(40.624.149.354,74)	54.360.038.328,93	(133,81)	(202.332.194.190,81)
PEMBIAYAAN	-				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA		42.070.949.354,74	42.184.796.500,74	100,27	245.350.493.545,55
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	BABV;5.1; 5.1.1;5;5.1	3.200.000,00	7.200.000,00	225,00	2.650.000,00

URAIAN	REFF	ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Jumlah Penerimaan		42.074.149.354,74	42.191.996.500,74	100,28	245.353.143.545,55
PENGELUARAN					
PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal	BABV;5.1;	1.100.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Pemerintah Daerah	5.1.1;5;5.2;5.2.1				
Pengeluaran Investasi	BABV;5.1;	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Non Permanen	5.1.1;5;5.2;5.2.2				
Jumlah Pengeluaran		1.450.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		40.624.149.354,74	42.191.996.500,74	103,86	244.403.143.545,55
Sisa Lebih					
Pembiayaan		(0,00)	96.552.034.829,67		42.070.949.354,74
Anggaran					

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI PACITAN
INDRATA NUR BAYUAJI

HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SQRT_X1	114	1,00	3,74	2,0602	,85028
SQRT_X2	114	11,63	73,36	20,1089	10,11734
SQRT_X3	114	19,34	42,23	30,3519	5,14498
SQRT_X4	114	7,71	24,41	16,6772	3,94641
SQRT_Y	114	8,73	52,48	19,0601	6,80718
Valid N (listwise)	114				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		3,14775721
Most Extreme Differences	Absolute Positive		,096
	Negative		-,075
Test Statistics			,096
Asymp. Sig. (2-tailed)			,012 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)			,233 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,222
		Upper Bound	,244

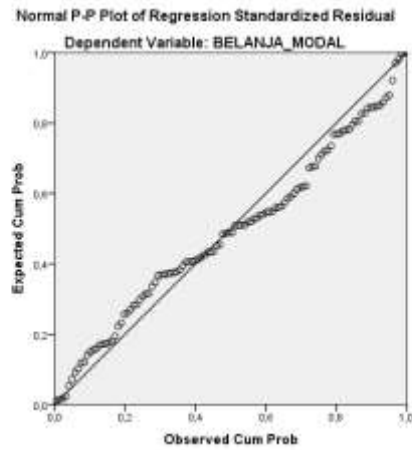
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Grafik P-P Plot Normalitas



b. Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SQRT_X1	,988	1,012
SQRT_X2	,794	1,259
SQRT_X3	,107	9,388
SQRT_X4	,112	8,934

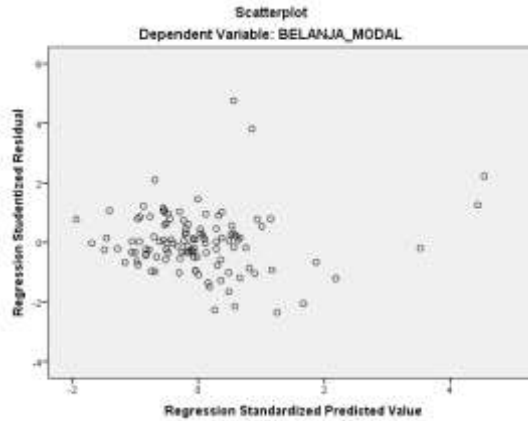
a. Dependent Variable: SQRT_Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot



d. Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,887 ^a	,786	,778	3,20499	2,124

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X1, SQRT_X2, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

e. Regresi Linier Sederhana

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,242 ^a	,059	,050	6,63358

a. Predictors: (Constant), SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,058	1,635		14,106	,000
	SQRT_X1	-1,941	,734	-,242	-2,644	,009

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,815 ^a	,664	,661	3,96374

a. Predictors: (Constant), SQRT_X2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,036	,829		9,694	,000
	SQRT_X2	,548	,037	,815	14,875	,000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,589 ^a	,347	,341	5,52536

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,595	3,110		-1,478	,142
	SQRT_X3	,779	,101	,589	7,714	,000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586 ^a	,344	,338	5,53819

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,189	2,262		,968	,335
	SQRT_X4	1,012	,132	,586	7,663	,000

a. Dependent Variable: SQRT_Y

f. Regresi Linier Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,887 ^a	,786	,778	3,20499	2,124

a. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X1, SQRT_X2, SQRT_X3

b. Dependent Variable: SQRT_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4116,519	4	1029,130	100,188	,000 ^b
	Residual	1119,646	109	10,272		
	Total	5236,165	113			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X4, SQRT_X1, SQRT_X2, SQRT_X3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,657	2,385		2,791	,006
	SQRT_X1	-1,673	,357	-,209	-4,691	,000
	SQRT_X2	,470	,033	,698	14,041	,000
	SQRT_X3	-,209	,180	-,158	-1,161	,248
	SQRT_X4	,764	,228	,443	3,344	,001

a. Dependent Variable: SQRT_Y



BIODATA PENULIS



Nama : Erina Setiana Putri
NIM : E20183035
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 12 September 2000
Falkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Ngengkreng RT/RW 01/04, Desa Sewor,
Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak : TK Hidup Sentosa
2. Sekolah Dasar : SD Negeri Wedoro
3. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Sukorame
4. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Bluluk
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Pengalaman Organisasi :
 - a. Anggota Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Bluluk
 - b. Anggota KASEI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2019-2020.